

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai ***usaha sadar dan terencana*** untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan Nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas Sumberdaya Manusia, mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri. Pendidikan Nasional juga harus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keunggulan, kesetiakawanan sosial dan kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi kemasa depan.

Pendidikan Nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan secara terpadu dan serasi, baik antar berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta antar daerah dengan menggunakan manajemen pendidikan yang makin mutakhir, efektif dan efisien serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan secara umum.

Pendidikan dirumuskan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan juga diarahkan untuk meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan diharapkan dapat sinergi antara top-down planning dan bottom up planning.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang pengelolaan pendidikan mendorong Dinas Pendidikan untuk segera mengimplementasikan langkah pelayanan menuju tercapainya target IPM khususnya dibidang pendidikan dengan menyusun dan merumuskan rencana program strategis penyelenggaraan teknis di bidang pendidikan. Untuk maksud tersebut perlu adanya Rencana Strategis bidang Pendidikan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Dinas Pendidikan yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Cirebon adalah untuk memberikan arah bagi seluruh dimensi kebijakan Dinas Pendidikan pada

periode tahun 2014-2019 serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cirebon.

1.2.2 Sasaran

Sasaran penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2014–2019, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- g. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- i. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
- j. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Nega Ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
- n. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Seri : E. 3)
- q. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 tahun 2014 tentang Fungsi, Tugas pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

1.4. KERANGKA PIKIR

Renstra Dinas Pendidikan dirumuskan dengan memperhatikan dokumen perencanaan baik tingkat Provinsi maupun Pusat, kondisi dan potensi serta masukan-masukan dari stakeholders untuk bersama-sama menggagas peningkatan kualitas pendidikan melalui Rapat/pertemuan , rakoor dan serta kegiatan lain dengan tujuan menjaring keinginan-keinginan stakeholders untuk kemudian dianalisis dan diformulasikan kedalam perumusan Visi dan Misi Dinas Pendidikan.

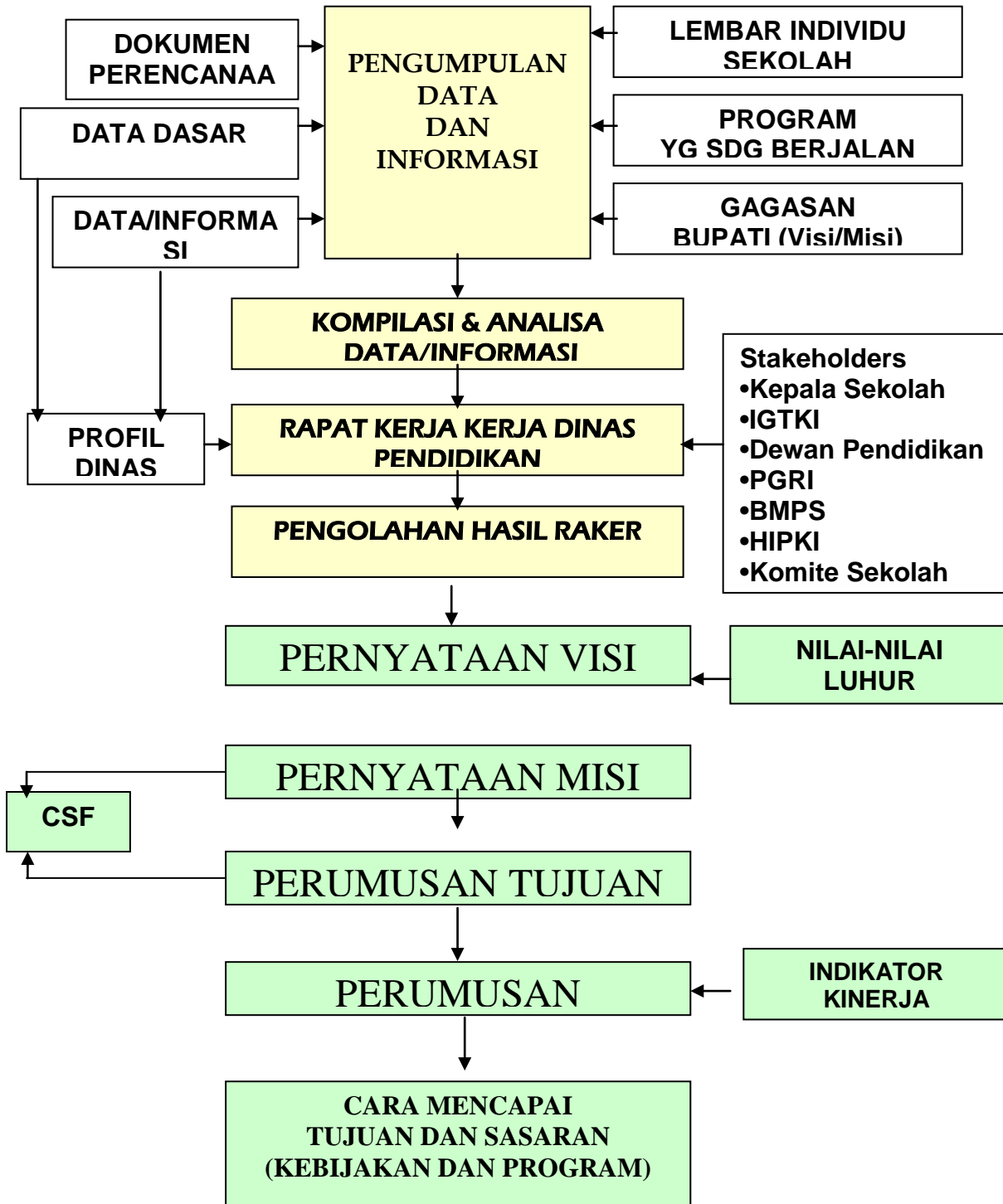
Setelah perumusan visi dan misi disepakati, dilakukan analisis lingkungan strategis untuk menentukan strategi umum dan faktor-faktor penentu keberhasilan (critical succes factor/ CSF). CSF ini menjadi acuan dalam merumuskan Tujuan dan Sasaran serta cara mencapainya yang mencakup kebijakan dan program-program pembangunan Dinas Pendidikan tahun 2014 – 2019.

Agar perumusan tujuan dan sasaran menjadi terukur, dirumuskan indikator kinerja, terutama indikator kinerja pada tingkat sasaran. Indikator kinerja

sasaran ini merupakan gambaran prestasi kerja yang akan dicapai dengan pendekatan outcome (hasil) dari program-program bidang kewenangan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2014 - 2019 disajikan dalam bagan 1.1.

Bagan 1.1. Alur Pikir Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan 2014-2019



1.5. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Renstra, tujuan dan sasaran, landasan hukum penyusunan, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS

Berisi tentang struktur organisasi, fungsi dan tugas pokok, kinerja dinas serta karakteristik pendidikan di Kabupaten Cirebon.

BAB. III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Menyajikan uraian analisis lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, serta permasalahan yang dihadapi.

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

Berisi tentang pernyataan Visi, Misi dan penjelasannya, tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan lima tahun kedepan.

BAB. V STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang strategi dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan serta arah kebijakan pendidikan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menyajikan indikator kinerja sesuai RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019

BAB VII PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS

2.1 Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan unsur Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diberi tanggungjawab secara teknis dan administratif dalam bidang pendidikan. Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon sesuai peraturan Bupati nomor 33 Tahun 2014 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat membawahi:
 - a) Sub Bagian Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sum Bagian Umum
- 3) Bidang Pendidikan Dasar Membawahi:
 - a) Seksi Kurikulum
 - b) Seksi Kesiswaan
 - c) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan
- 4) Bidang Pendidikan Menengah
 - a) Seksi Kurikulum
 - b) Seksi Kesiswaan
 - c) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan
- 5) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal
 - a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 - b) Seksi Pendidikan Masyarakat Kursus dan Pelatihan
 - c) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan
- 6) Bidang Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan Aset
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan PAUDNI
 - c) Seksi Inventarisasi dan Pengelolaan Aset

2.2 Fungsi dan Tugas Pokok Dinas

Fungsi Dinas Pendidikan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Sedangkan Tugas Pokok Dinas adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan, fungsi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan meliputi: merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pendidikan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon meliputi pelayanan pendidikan terhadap seluruh anak usia sekolah mulai dari Pendidikan Usia Dini, SD, SMP, SMA, SMK serta pendidikan non formal melalui Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional.

Agar anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan sesuai haknya, pemerintah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bea siswa dan lain-lain. Sedangkan untuk pemenuhan tenaga pendidik dipenuhi melalui penangkatan CPNS serta penunjukan guru honorer menggunakan dana BOS sesuai juknis yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengenai kebutuhan sarana prasarana dipenuhi melalui dana Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain, dana dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Cirebon serta dana partisipasi lainnya.

Pada masa lalu tata kelola pendidikan belum sepenuhnya berbasis data atau sistem informasi yang akurat, tepat dan akuntabel. Namun sekarang sistem tersebut telah dibangun diantaranya DAPODIK, PADAMU NEGERI dan lain-lain meskipun sampai saat ini masih terus menerus diadakan penyempurnaan dan perbaikan guna terpenuhinya satu-satunya data pendidikan yang dapat digunakan oleh stakeholders yang membutuhkan.

2.4 Karakteristik Pendidikan

Pembangunan pendidikan harus dilakukan secara lintas sektoral dan terpadu antar instansi pemerintah serta antara pemerintah, masyarakat, dan orangtua. Untuk itu perlu dikembangkan iklim pembangunan pendidikan yang memungkinkan bagi setiap komponen pemerintahan maupun masyarakat untuk bisa secara bersama-sama membahas pendidikan sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya masing-masing.

Masalah-masalah teknis non-kependidikan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan antara lain komunikasi, transportasi, sosial budaya, dan sosial ekonomi. Penanganannya perlu dilakukan secara lintas sektoral, agar pemerataan pendidikan dan pemberian pelayanan pendidikan minimal bagi masyarakat bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu komponen IPM adalah indek pendidikan, sedangkan RLS dan AMH merupakan indikator dalam pencapaian indek pendidikan. Dengan demikian perlu adanya data yang lengkap dan akurat sebagai dasar penyusunan perencanaan tentang jumlah penduduk usia sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana, karena semua itu saling terkait dalam meningkatkan RLS dan AMH sehingga pada gilirannya dapat mendongkrak IPM sesuai target yang ditetapkan.

2.4.1 Jumlah Penduduk usia sekolah

Penduduk Kabupaten Cirebon berjumlah 2.161.929 orang, laki-laki 1.088.920 Orang dan perempuan 1.073.009 orang tersebar di 40 Kecamatan / 424 desa dan kelurahan dengan kondisi ekonomi keluarga 30,92% pra KS, 27,91% KS 1, 24,94 % KS 14,11% KS 111 dan selebihnya merupakan keluarga KS 111+ . Dari jumlah tersebut penduduk usia sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SM sumber data Suseda tahun 2008 sebanyak 902.326 orang terdiri dari laki-laki 458.503 orang dan perempuan 443.823 orang.

Penduduk Usia Sekolah

PENDUDUK UMUR 7 - 12 TH MENURUT PARTISIPASI SEKOLAH DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN CIREBON (HASIL SURVEI IPM TAHUN 2012)

Laki-laki+Perempuan

No	Kecamatan	Partisipasi Sekolah			Jumlah
		Tidak / Belum Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
1	010 WALED	0	7.304	299	7.603
2	011 PASALEMAN	91	2.580	0	2.671
3	020 CILEDUG	98	4.756	98	4.952
4	021 PABUARAN	103	5.302	103	5.508
5	030 LOSARI	175	7.449	0	7.624
6	031 PABEDILAN	0	8.426	0	8.426
7	040 BABAkan	118	7.732	0	7.850
8	041 GEBANG	98	8.484	198	8.780
9	050 KARANGSEMBUNG	84	5.823	0	5.907
10	051 KARANGWARENG	0	4.026	158	4.184
11	060 LEMAHABANG	0	6.697	312	7.009
12	061 SUSUKAN LEBAK	74	5.202	67	5.343
13	070 SEDONG	211	4.809	0	5.020
14	080 ASTANAJAPURA	0	12.267	251	12.518
15	081 PANGENAN	0	5.745	217	5.962
16	090 MUNDU	0	11.638	148	11.786
17	100 BEBER	0	3.419	76	3.495
18	101 GREGED	0	6.503	0	6.503
19	111 TALUN	0	8.742	131	8.873
20	120 SUMBER	0	10.385	126	10.511
21	121 DUKUPUNTANG	0	9.811	99	9.910
22	130 PALIMANAN	96	7.704	0	7.800
23	140 PLUMBON	198	12.167	303	12.668
24	141 DEPOK	118	8.870	230	9.218
25	150 WERU	0	7.758	310	8.068
26	151 PLERED	193	7.067	0	7.260
27	161 TENGAH TANI	88	5.567	88	5.743
28	162 KEDAWUNG	0	7.787	300	8.087
29	171 GUNUNGJATI	125	9.694	500	10.319
30	180 KAPETAKAN	0	7.990	258	8.248
31	181 SURANENGGALA	0	4.489	179	4.668
32	190 KLANGENAN	116	5.947	107	6.170
33	191 JAMBLANG	103	4.389	0	4.492
34	200 ARJAWINANGUN	0	9.118	0	9.118
35	201 PANGURAGAN	0	4.760	125	4.885
36	210 CIWARINGIN	0	4.594	0	4.594
37	211 GEMPOL	94	5.793	0	5.887
38	220 SUSUKAN	0	9.899	0	9.899
39	230 GEGESIK	0	9.772	113	9.885
40	231 KALIWEDI	0	4.175	0	4.175
Jumlah		2.183	284.640	4.796	291.619

Sumber Data Survei IPM 2012, Kabupaten Cirebon

PENDUDUK KELOMPOK UMUR 13 S.D. 15 TAHUN MENURUT PARTISIPASI SEKOLAH DAN
JENIS KELAMIN DI KABUPATEN CIREBON (HASIL SURVEI IPM TAHUN 2012)

Laki-laki+Perempuan

No	Kecamatan	Partisipasi Sekolah			Jumlah
		Tidak / Belum Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
1	010 WALED	0	3.409	790	4.199
2	011 PASALEMAN	0	1.402	0	1.402
3	020 CILEDUG	0	3.116	384	3.500
4	021 PABUARAN	0	2.432	0	2.432
5	030 LOSARI	0	3.663	187	3.850
6	031 PABEDILAN	0	2.749	615	3.364
7	040 BABAKAN	0	5.128	457	5.585
8	041 GEBANG	0	3.916	598	4.514
9	050 KARANGSEMBUNG	0	2.101	309	2.410
10	051 KARANGWARENG	0	1.370	152	1.522
11	060 LEMAHABANG	0	2.155	722	2.877
12	061 SUSUKAN LEBAK	0	1.816	425	2.241
13	070 SEDONG	108	1.439	730	2.277
14	080 ASTANAJAPURA	0	3.590	877	4.467
15	081 PANGENAN	0	2.357	570	2.927
16	090 MUNDU	0	3.774	872	4.646
17	100 BEBER	0	2.192	234	2.426
18	101 GREGED	0	4.173	245	4.418
19	111 TALUN	0	4.247	530	4.777
20	120 SUMBER	0	6.229	371	6.600
21	121 DUKUPUNTANG	0	4.800	297	5.097
22	130 PALIMANAN	0	3.441	386	3.827
23	140 PLUMBON	0	5.563	388	5.951
24	141 DEPOK	0	3.177	235	3.412
25	150 WERU	0	4.736	463	5.199
26	151 PLERED	0	3.350	292	3.642
27	161 TENGAH TANI	0	2.435	265	2.700
28	162 KEDAWUNG	150	3.786	165	4.101
29	171 GUNUNGJATI	125	5.845	369	6.339
30	180 KAPETAKAN	0	4.047	912	4.959
31	181 SURANENGGALA	0	2.703	0	2.703
32	190 KLANGENAN	0	3.268	537	3.805
33	191 JAMBLANG	103	1.612	412	2.127
34	200 ARJAWINANGUN	127	5.154	127	5.408
35	201 PANGURAGAN	0	3.896	0	3.896
36	210 CIWARINGIN	135	2.566	369	3.070
37	211 GEMPOL	94	3.478	0	3.572
38	220 SUSUKAN	0	5.665	148	5.813
39	230 GEGESIK	0	2.564	783	3.347
40	231 KALIWEDI	0	2.838	291	3.129
Jumlah		842	136.182	15.507	152.531

Sumber Data Survei IPM 2012, Kabupaten Cirebon

**PENDUDUK UMUR 16 S.D. 18 TH MENURUT PARTISIPASI SEKOLAH DAN
JENIS KELAMIN DI KABUPATEN CIREBON (HASIL SURVEI IPM TAHUN 2012)**

Laki-laki+Perempuan

No	Kecamatan	Partisipasi Sekolah			Jumlah
		Tidak / Belum Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
1	010 WALED	0	795	3.251	4.046
2	011 PASALEMAN	0	553	787	1.340
3	020 CILEDUG	0	1.128	624	1.752
4	021 PABUARAN	0	1.003	1.604	2.607
5	030 LOSARI	0	2.368	1.582	3.950
6	031 PABEDILAN	0	1.225	1.935	3.160
7	040 BAKAKAN	0	2.174	524	2.698
8	041 GEBANG	100	598	3.438	4.136
9	050 KARANGSEMBUNG	0	957	1.607	2.564
10	051 KARANGWARENG	0	790	1.367	2.157
11	060 LEMAHABANG	0	1.014	1.612	2.626
12	061 SUSUKAN LEBAK	0	843	277	1.120
13	070 SEDONG	0	622	1.689	2.311
14	080 ASTANAJAPURA	0	1.630	3.370	5.000
15	081 PANGENAN	0	1.093	3.173	4.266
16	090 MUNDU	0	1.914	4.643	6.557
17	100 BEBER	0	1.477	1.141	2.618
18	101 GREGED	0	1.238	2.111	3.349
19	111 TALUN	0	2.534	1.389	3.923
20	120 SUMBER	0	3.008	2.223	5.231
21	121 DUKUPUNTANG	0	1.549	2.415	3.964
22	130 PALIMANAN	97	2.794	787	3.678
23	140 PLUMBON	0	2.594	1.572	4.166
24	141 DEPOK	0	1.257	2.970	4.227
25	150 WERU	0	2.651	2.933	5.584
26	151 PLERED	0	2.242	2.781	5.023
27	161 TENGAH TANI	0	1.107	2.220	3.327
28	162 KEDAWUNG	0	4.148	1.917	6.065
29	171 GUNUNGJATI	250	3.457	1.544	5.251
30	180 KAPETAKAN	0	1.824	3.495	5.319
31	181 SURANENGGALA	0	2.602	338	2.940
32	190 KLANGENAN	0	2.216	1.689	3.905
33	191 JAMBLANG	0	2.156	2.316	4.472
34	200 ARJAWINANGUN	0	1.653	2.454	4.107
35	201 PANGURAGAN	0	1.753	774	2.527
36	210 CIWARINGIN	0	2.185	1.308	3.493
37	211 GEMPOL	0	1.198	584	1.782
38	220 SUSUKAN	0	2.791	1.336	4.127
39	230 GEGESIK	113	2.805	1.388	4.306
40	231 KALIWEDI	0	1.553	1.452	3.005
Jumlah		560	71.499	74.620	146.679

Sumber Data Survei IPM 2012, Kabupaten Cirebon

A. Jumlah peserta didik

Banyak sedikitnya jumlah peserta didik berpengaruh langsung pada tingkat capaian RLS sekaligus tingkat capaian APK, APM pada semua jenjang pendidikan. Dengan demikian perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk terus meningkatkan jumlah peserta didik pada semua jenjang.

JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

NO	KECAMATAN	Negeri			Swasta			Jumlah
		L	P	L+P	L	P	L+P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Waled	2.778	2.620	5.399	0	0	0	5.399
2	Ciledug	2.544	2.421	4.965	70	78	149	5.113
3	Losari	2.462	2.200	4.661	0	0	0	4.661
4	Babakan	3.942	3.615	7.558	0	0	0	7.558
5	Karang Sembung	2.023	1.911	3.934	0	0	0	3.934
6	Lemahabang	3.122	2.846	5.968	149	162	311	6.278
7	Sedong	2.208	2.172	4.380	0	0	0	4.380
8	Astana Japura	2.878	2.711	5.589	150	143	292	5.881
9	Mundu	3.634	3.306	6.939	0	0	0	6.939
10	Beber	2.506	2.185	4.692	0	0	0	4.692
11	Sumber	4.715	4.423	9.138	396	330	726	9.864
12	Palimanan	3.501	3.400	6.902	0	0	0	6.902
13	Plumbon	4.033	3.505	7.538	0	0	0	7.538
14	Weru	3.395	3.184	6.580	0	0	0	6.580
15	Kapetakan	3.121	2.845	5.966	0	0	0	5.966
16	Klangenan	2.784	2.556	5.341	0	0	0	5.341
17	Arjawinangun	3.626	3.376	7.002	66	61	127	7.129
18	Ciwaringin	1.835	1.802	3.637	0	0	0	3.637
19	Susukan	3.513	3.120	6.633	82	101	183	6.816
20	Gegesik	3.381	3.321	6.702	0	0	0	6.702
21	Susukan Lebak	1.842	1.802	3.644	0	0	0	3.644
22	Pabedilan	2.639	2.345	4.984	55	36	91	5.075
23	Dukupuntang	3.083	2.777	5.860	0	0	0	5.860
24	Panguragan	2.231	2.148	4.379	0	0	0	4.379
25	Kaliwedi	1.755	1.659	3.414	0	0	0	3.414
26	Pangenan	2.009	1.764	3.773	0	0	0	3.773
27	Gebang	3.195	3.036	6.231	147	157	303	6.534
28	Depok	3.168	2.993	6.161	0	0	0	6.161
29	Kedawung	2.299	2.143	4.441	176	119	295	4.737
30	Karangwareng	1.509	1.312	2.821	0	0	0	2.821
31	Talun	3.219	2.952	6.172	0	0	0	6.172
32	Gunung Jati	3.201	3.037	6.238	137	104	241	6.479
33	Pasaleman	1.335	1.278	2.613	0	0	0	2.613
34	Pabuaran	1.919	1.724	3.643	0	0	0	3.643
35	Tengah Tani	2.322	2.116	4.438	0	0	0	4.438
36	Plered	3.516	3.155	6.671	0	0	0	6.671
37	Gempol	2.373	2.193	4.566	44	32	75	4.641
38	Greged	3.377	3.092	6.469	0	0	0	6.469
39	Suranenggala	2.450	2.258	4.708	0	0	0	4.708
40	Jamblang	2.042	1.902	3.944	0	0	0	3.944
JML		111.487	103.206	214.693	1.473	1.322	2.794	217.487

Sumber data : Profil Pendidikan Data Dasar 31 Agustus 2013

JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	KECAMATAN	Negeri			Swasta			Jumlah
		L	P	L+P	L	P	L+P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Waled	442	575	1.017	437	406	843	1.860
2	Ciledug	870	1003	1.873	311	259	570	2.443
3	Losari	975	1111	2.086	287	215	502	2.588
4	Babakan	697	836	1.533	513	439	952	2.485
5	Karang Sembung	821	875	1.696	440	277	717	2.413
6	Lemahabang	793	857	1.650	339	269	608	2.258
7	Sedong	354	276	630			0	630
8	Astana Japura	460	568	1.028	567	409	976	2.004
9	Mundu	613	566	1.179	116	99	215	1.394
10	Beber	479	529	1.008	106	0	106	1.114
11	Sumber	1275	1356	2.631	439	354	793	3.424
12	Palimanan	1754	2082	3.836	542	416	958	4.794
13	Plumbon	510	427	937	120	68	188	1.125
14	Weru	848	921	1.769	1345	1073	2.418	4.187
15	Kapetakan	874	929	1.803			0	1.803
16	Klangenan	756	759	1.515	115	64	179	1.694
17	Arjawinangun	775	846	1.621	419	325	744	2.365
18	Ciwaringin	954	992	1.946	378	374	752	2.698
19	Susukan	152	164	316	203	307	510	826
20	Gegesik	1098	1283	2.381	489	513	1.002	3.383
21	Susukan Lebak	759	779	1.538			0	1.538
22	Pabedilan	839	883	1.722			0	1.722
23	Dukupuntang	484	479	963	577	596	1.173	2.136
24	Panguragan	526	519	1.045	130	106	236	1.281
25	Kaliwedi	639	691	1.330			0	1.330
26	Pangenan	600	531	1.131	304	232	536	1.667
27	Gebang	807	858	1.665	154	183	337	2.002
28	Depok	822	781	1.603	194	198	392	1.995
29	Kedawung	459	579	1.038	191	195	386	1.424
30	Karangwareng	328	381	709	24	25	49	758
31	Talun	536	616	1.152			0	1.152
32	Gunung Jati	1270	1471	2.741			0	2.741
33	Pasaleman	365	374	739	177	172	349	1.088
34	Pabuaran	392	381	773	295	240	535	1.308
35	Tengah Tani	515	461	976	45	25	70	1.046
36	Plered	1175	1223	2.398			0	2.398
37	Gempol	514	548	1.062	47	17	64	1.126
38	Greged	429	463	892	96	78	174	1.066
39	Suranenggala	809	996	1.805	55	53	108	1.913
40	Jamblang	800	880	1.680	37	19	56	1.736
JML		28.568	30.849	59.417	9.492	8.006	17.498	76.915

Profil Pendidikan data dasar 31 Agustus 2013

JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NO	KECAMATAN	Negeri			Swasta			Jumlah
		L	P	L+P	L	P	L+P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Waled	187	505	692			0	692
2	Ciledug	194	457	651	68	80	148	799
3	Losari	267	380	647	82	58	140	787
4	Babakan	298	680	978	40	28	68	1.046
5	Karang Sembung			0	62	71	133	133
6	Lemahabang	300	653	953	205	455	660	1.613
7	Sedong			0			0	0
8	Astana Japura	295	493	788			0	788
9	Mundu			0			0	0
10	Beber	304	486	790			0	790
11	Sumber	315	434	749			0	749
12	Palimanan	341	546	887	45	38	83	970
13	Plumbon	250	566	816	31	17	48	864
14	Weru			0	38	18	56	56
15	Kapetakan			0			0	0
16	Klangenan			0	44	18	62	62
17	Arjawinangun	312	609	921			0	921
18	Ciwaringin	236	470	706			0	706
19	Susukan	305	459	764	63	93	156	920
20	Gegesik	259	555	814	162	279	441	1.255
21	Susukan Lebak			0			0	0
22	Pabedilan	244	371	615	33	60	93	708
23	Dukupuntang	312	571	883	101	87	188	1.071
24	Panguragan			0	87	81	168	168
25	Kaliwedi			0			0	0
26	Pangenan			0			0	0
27	Gebang			0			0	0
28	Depok			0			0	0
29	Kedawung			0	260	444	704	704
30	Karangwareng	147	390	537			0	537
31	Talun			0			0	0
32	Gunung Jati			0			0	0
33	Pasaleman			0			0	0
34	Pabuaran			0			0	0
35	Tengah Tani			0	79	52	131	131
36	Plered			0			0	0
37	Gempol			0			0	0
38	Greged			0			0	0
39	Suranenggala	318	341	659			0	659
40	Jamblang	271	573	844			0	844
JML		5.155	9.539	14.694	1.400	1.879	3.279	17.973

Profil Pendidikan data dasar 31 Agustus 2013

**JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK)**

NO	KECAMATAN	Negeri			Swasta			Jumlah
		L	P	L+P	L	P	L+P	L+P
1	Waled			0	146	181	327	327
2	Ciledug			0	569	639	1.208	1.208
3	Losari			0	200	132	332	332
4	Babakan			0	402	353	755	755
5	Karang Sembung			0			0	0
6	Lemahabang	465	848	1.313	1.633	1.037	2.670	3.983
7	Sedong			0	45	110	155	155
8	Astana Japura			0	1.264	338	1.602	1.602
9	Mundu	1.144	301	1.445	188	24	212	1.657
10	Beber			0	65	93	158	158
11	Sumber			0	1.141	331	1.472	1.472
12	Palimanan			0	1.352	1.290	2.642	2.642
13	Plumbon			0	276	283	559	559
14	Weru			0	1.853	941	2.794	2.794
15	Kapetakan			0	73	113	186	186
16	Klangenan			0			0	0
17	Arjawinangun			0	438	468	906	906
18	Ciwaringin			0	775	505	1.280	1.280
19	Susukan	688	271	959	181	125	306	1.265
20	Gegesik			0	1.068	423	1.491	1.491
21	Susukan Lebak			0	85	60	145	145
22	Pabedilan			0			0	0
23	Dukupuntang			0	1.307	1.457	2.764	2.764
24	Panguragan			0	20	16	36	36
25	Kaliwedi			0	220	204	424	424
26	Pangenan			0	135	55	190	190
27	Gebang	576	95	671	328	287	615	1.286
28	Depok			0	1.110	1.352	2.462	2.462
29	Kedawung	217	1.215	1.432	3.254	2.908	6.162	7.594
30	Karangwareng			0	91	130	221	221
31	Talun			0			0	0
32	Gunung Jati	402	237	639	12	26	38	677
33	Pasaleman			0			0	0
34	Pabuaran			0	1.442	267	1.709	1.709
35	Tengah Tani			0			0	0
36	Plered			0			0	0
37	Gempol			0	49	54	103	103
38	Greged			0	58	71	129	129
39	Suranenggala			0			0	0
40	Jamblang	1.286	476	1.762			0	1.762
JML		4.778	3.443	8.221	19.780	14.273	34.053	42.274

Profil Pendidikan data dasar 31 Agustus 2013

B. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan

Dalam rangka merealisasikan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yakni " Masyarakat Kabupaten Cirebon Cerdas dan Kompetitif " diperlukan tenaga pendidik dan kependidikan dengan jumlah yang memadai. Saat ini jumlahnya masih sangat kurang atau belum sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan sehingga mayoritas sekolah mengangkat tenaga honorer untuk menutup kebutuhan tersebut. Selain itu masih terdapat berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi guru, antara lain ; (1) adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan, (2) belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru (3) pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan, dan (4) kesejahteraan guru yang belum memadai. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut dibawah ini dapat dilihat jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Cirebon.

Jumlah Tenaga Pendidik

JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

NO	KECAMATAN	PNS			Subjumlah	Non-PNS	Jumlah
		Gol II	Gol III	Gol IV			
1	Waled	27	16	103	146	79	225
2	Ciledug	20	28	103	151	69	220
3	Losari	17	28	86	131	71	202
4	Babakan	34	27	135	196	91	287
5	Karang Sembung	22	21	59	102	66	168
6	Lemahabang	21	32	92	145	107	252
7	Sedong	10	19	72	101	46	147
8	Astana Japura	13	17	91	121	85	206
9	Mundu	18	25	73	116	108	224
10	Beber	15	10	73	98	59	157
11	Sumber	38	43	209	290	124	414
12	Palimanan	44	36	138	218	63	281
13	Plumbon	65	36	155	256	55	311
14	Weru	29	31	125	185	63	248
15	Kapetakan	26	22	93	141	79	220
16	Klangenan	42	40	121	203	55	258
17	Arjawinangun	46	44	108	198	80	278
18	Ciwaringin	24	14	95	133	29	162
19	Susukan	28	29	115	172	83	255
20	Gegesik	44	56	134	234	77	311
21	Susukan Lebak	12	21	59	92	51	143

22	Pabedilan	31	25	94	150	66	216
23	Dukupuntang	32	42	111	185	58	243
24	Panguragan	22	29	68	119	67	186
25	Kaliwedi	41	27	62	130	32	162
26	Pangenan	9	13	52	74	49	123
27	Gebang	30	20	103	153	109	262
28	Depok	38	35	131	204	70	274
29	Kedawung	16	11	93	120	75	195
30	Karangwareng	12	18	49	79	31	110
31	Talun	27	16	120	163	66	229
32	Gunung Jati	28	37	158	223	63	286
33	Pasaleman	21	6	45	72	34	106
34	Pabuaran	23	19	61	103	52	155
35	Tengah Tani	14	11	92	117	70	187
36	Plered	48	25	104	177	62	239
37	Gempol	29	30	80	139	61	200
38	Greged	13	12	62	87	98	185
39	Suranenggala	20	20	93	133	63	196
40	Jablang	39	26	70	135	45	180
JML		939	904	3.478	5.321	2.382	7.703

Profil Pendidikan data dasar 31 Agustus 2013

JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	KECAMATAN	PNS			Subjumlah	Non-PNS	Jumlah
		Gol II	Gol III	Gol IV			
1	Waled	0	12	12	24	96	120
2	Ciledug	0	22	24	46	79	125
3	Losari	0	16	32	48	107	155
4	Babakan	2	17	29	48	99	147
5	Karang Sembung	1	11	31	43	67	110
6	Lemahabang	0	17	28	45	78	123
7	Sedong	0	9	6	15	18	33
8	Astana Japura	0	6	21	27	110	137
9	Mundu	0	10	24	34	51	85
10	Beber	0	6	21	27	27	54
11	Sumber	0	29	60	89	113	202
12	Palimanan	0	30	79	109	135	244
13	Plumbon	1	6	20	27	28	55
14	Weru	0	19	35	54	147	201
15	Kapetakan	1	17	17	35	47	82
16	Klangenan	1	17	17	35	75	110
17	Arjawinangun	0	22	34	56	144	200
18	Ciwaringin	2	13	31	46	86	132
19	Susukan	0	7	1	8	36	44
20	Gegesik	0	27	32	59	117	176
21	Susukan Lebak	0	12	26	38	29	67
22	Pabedilan	0	19	22	41	33	74
23	Dukupuntang	0	11	23	34	127	161
24	Panguragan	0	6	23	29	58	87
25	Kaliwedi	0	13	20	33	32	65
26	Pangenan	0	17	11	28	108	136
27	Gebang	0	22	21	43	98	141
28	Depok	0	16	28	44	70	114
29	Kedawung	0	5	29	34	36	70
30	Karangwareng	0	11	8	19	38	57
31	Talun	0	9	32	41	21	62

32	Gunung Jati	1	15	60	76	42	118
33	Pasaleman	0	8	11	19	35	54
34	Pabuaran	0	15	7	22	62	84
35	Tengah Tani	0	12	17	29	20	49
36	Plered	1	32	38	71	49	120
37	Gempol	0	13	11	24	38	62
38	Greged	0	11	9	20	52	72
39	Suranenggala	0	10	28	38	56	94
40	Jamblang	0	22	35	57	38	95
JML		10	592	1.013	1.615	2.702	4.317

Profil Pendidikan data dasar 31 Agustus 2013

JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NO	KECAMATAN	PNS			Subjumlah	Non-PNS	Jumlah
		Gol II	Gol III	Gol IV			
1	Waled	0	21	6	27	9	36
2	Ciledug	0	18	5	23	34	57
3	Losari	0	20	4	24	22	46
4	Babakan	0	10	32	42	22	64
5	Karang Sembung	0	0	0	0	21	21
6	Lemahabang	0	6	32	38	54	92
7	Sedong	0			0		0
8	Astana Japura	0	20	4	24	12	36
9	Mundu	0			0		0
10	Beber	0	12	23	35	5	40
11	Sumber	0	13	33	46	5	51
12	Palimanan	0	17	27	44	20	64
13	Plumbon	0	13	29	42	18	60
14	Weru	0	0	2	2	10	12
15	Kapetakan	0			0		0
16	Klangenan	0	0	0	0	10	10
17	Arjawinangun	0	12	35	47	9	56
18	Ciwaringin	0	24	4	28	11	39
19	Susukan	0	24	3	27	37	64
20	Gegesik	0	23	5	28	60	88
21	Susukan Lebak	0			0		0
22	Pabedilan	0	9	16	25	27	52
23	Dukupuntang	0	18	29	47	51	98
24	Panguragan	0	0	0	0	16	16
25	Kaliwedi	0			0		0
26	Pangenan	0			0		0
27	Gebang	0			0		0
28	Depok	0			0		0
29	Kedawung	0	0	3	3	89	92
30	Karangwareng	0	14	10	24	10	34
31	Talun	0			0		0
32	Gunung Jati	0			0		0
33	Pasaleman	0			0		0
34	Pabuaran	0			0		0
35	Tengah Tani	0	0	0	0	24	24
36	Plered	0			0		0
37	Gempol	0			0		0
38	Greged	0			0		0
39	Suranenggala	0	9	16	25	14	39
40	Jamblang	0	14	26	40	4	44
JML		0	297	344	641	594	1.235

Profil Pendidikan data dasar 31 Agustus 2013

JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NO	KECAMATAN	PNS			Subjumlah	Non-PNS	Jumlah
		Gol II	Gol III	Gol IV			
1	Waled	0	0	0	0	22	22
2	Ciledug	0	0	3	3	43	46
3	Losari	0	0	0	0	21	21
4	Babakan	0	0	0	0	65	65
5	Karang Sembung				0		0
6	Lemahabang	0	32	22	54	158	212
7	Sedong	0	0	0	0	13	13
8	Astana Japura	0	0	0	0	120	120
9	Mundu	0	37	36	73	60	133
10	Beber	0	0	0	0	13	13
11	Sumber	0	0	1	1	68	69
12	Palimanan	0	0	3	3	138	141
13	Plumbon	0	0	0	0	55	55
14	Weru	0	0	1	1	148	149
15	Kapetakan	0	0	0	0	43	43
16	Klangenan				0		0
17	Arjawinangun	0	0	1	1	98	99
18	Ciwaringin	0	0	2	2	106	108
19	Susukan	0	27	11	38	40	78
20	Gegesik	0	0	0	0	134	134
21	Susukan Lebak	0	0	0	0	18	18
22	Pabedilan				0		0
23	Dukupuntang	0	0	0	0	200	200
24	Panguragan	0	0	0	0	11	11
25	Kaliwedi	0	0	0	0	53	53
26	Pangenan	0	0	0	0	39	39
27	Gebang	0	15	3	18	78	96
28	Depok	0	0	0	0	128	128
29	Kedawung	0	14	45	59	456	515
30	Karangwareng	0	0	0	0	22	22
31	Talun				0		0
32	Gunung Jati	0	18	5	23	31	54
33	Pasaleman				0		0
34	Pabuaran	0	0	0	0	97	97
35	Tengah Tani				0		0
36	Plered				0		0
37	Gempol	0	0	0	0	18	18
38	Greged	0	0	0	0	15	15
39	Suranenggala				0		0
40	Jamblang	0	47	2	49	26	75
JML		0	190	135	325	2.537	2.862

Profil Pendidikan data dasar 31 Agustus 2013

D. Jumlah sarana dan prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mutlak diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya. Saat ini yang terlihat jelas adalah masih kurangnya daya tampung apabila dibandingkan antara rasio jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah ruang kelas yang ada pada setiap jenjang pendidikan. Apabila tidak segera diatasi maka akan berdampak pada rendahnya APK, APM di Kabupaten Cirebon.

JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN DAN RUANG KELAS JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

NO	KECAMATAN	N	S	JML	Ruang Kelas Milik menurut Kondisi				Ruang Kelas	Ruang Kelas
					Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah	Bkn Milik	Seluruh
1	Waled	23		23	112	34	12	158	4	162
2	Ciledug	21	1	22	138	28	34	200	0	200
3	Losari	21		21	91	22	11	124	0	124
4	Babakan	31		31	138	46	30	214	7	221
5	KR Sembung	22		22	90	21	15	126	0	126
6	Lemahabang	27	1	28	119	47	9	175	0	175
7	Sedong	22		22	91	27	10	128	2	130
8	Astana Japura	22	2	24	118	23	13	154	0	154
9	Mundu	23		23	96	20	18	134	0	134
10	Beber	19		19	86	20	11	117	0	117
11	Sumber	32	3	35	175	74	11	260	0	260
12	Palimanan	29		29	118	30	28	176	1	177
13	Plumbon	31		31	146	35	31	212	2	214
14	Weru	23		23	115	24	16	155	6	161
15	Kapetakan	20		20	102	32	5	139	3	142
16	Klangenan	25		25	112	27	14	153	6	159
17	Arjawinangun	27	1	28	127	32	15	174	0	174
18	Ciwaringin	16		16	90	14	13	117	0	117
19	Susukan	28	1	29	120	39	25	184	0	184
20	Gegesik	31		31	143	30	31	204	0	204
21	Susukan Lebak	21		21	69	48	20	137	1	138
22	Pabedilan	26	1	27	100	36	26	162	6	168
23	Dukupuntang	28		28	107	53	20	180	0	180
24	Panguragan	20		20	92	24	11	127	0	127
25	Kaliwedi	16		16	81	24	1	106	0	106
26	Pangenan	15		15	63	17	7	87	0	87
27	Gebang	24	2	26	119	43	13	175	8	183
28	Depok	26		26	121	47	14	182	0	182
29	Kedawung	15	1	16	104	7	8	119	0	119
30	Karangwareng	16		16	73	18	6	97	1	98
31	Talun	23		23	100	31	21	152	0	152
32	Gunung Jati	30	2	32	108	63	41	212	15	227
33	Pasaleman	13		13	42	31	5	78	0	78
34	Pabuaran	15		15	77	18	6	101	0	101
35	Tengah Tani	18		18	86	16	8	110	0	110
36	Plered	22		22	120	23	10	153	8	161
37	Gempol	18	1	19	85	33	11	129	0	129
38	Greged	19		19	80	24	13	117	2	119
39	Suranenggala	20		20	91	17	15	123	0	123
40	Jamblang	20		20	75	32	16	123	0	123
JML		898	16	914	4.120	1.230	624	5.974	72	6.046

Profil Pendidikan 2013/2014 data dasar 31 Agustus 2013

JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	KECAMATAN	N	S	JML	Ruang Kelas Milik menurut Kondisi				Ruang Kelas	Ruang Kelas
					Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah	Bkn Milik	Seluruh
1	Waled	2	3	5	35	4	1	40	4	44
2	Ciledug	2	3	5	58	8	0	66	0	66
3	Losari	3	3	6	53	10	8	71	0	71
4	Babakan	2	4	6	56	11	5	72	0	72
5	Karang Sembung	3	1	4	38	21	7	66	16	82
6	Lemahabang	2	3	5	47	14	0	61	0	61
7	Sedong	2		2	14	5	4	23	0	23
8	Astana Japura	1	5	6	39	18	3	60	5	65
9	Mundu	2	2	4	26	9	3	38	11	49
10	Beber	1	1	2	20	7	2	29	0	29
11	Sumber	3	4	7	61	28	2	91	0	91
12	Palimanan	4	4	8	95	10	11	116	0	116
13	Plumbon	1	1	2	22	9	2	33	0	33
14	Weru	2	4	6	62	11	7	80	0	80
15	Kapetakan	2		2	32	10	3	45	0	45
16	Klangenan	2	2	4	24	5	0	29	5	34
17	Arjawinangun	2	7	9	61	21	8	90	6	96
18	Ciwaringin	2	1	3	54	6	4	64	0	64
19	Susukan	1	1	2	22	2	3	27	0	27
20	Gegesik	3	3	6	87	2	5	94	2	96
21	Susukan Lebak	2		2	29	6	6	41	0	41
22	Pabedilan	2		2	45	4	1	50	0	50
23	Dukupuntang	1	5	6	47	4	5	56	0	56
24	Panguragan	1	2	3	35	9	0	44	0	44
25	Kaliwedi	2		2	33	3	3	39	0	39
26	Pangenan	2	3	5	38	8	5	51	0	51
27	Gebang	2	3	5	31	12	7	50	0	50
28	Depok	2	3	5	40	4	3	47	0	47
29	Kedawung	1	2	3	44	7	0	51	0	51
30	Karangwareng	2	1	3	18	2	0	20	2	22
31	Talun	2		2	23	6	0	29	0	29
32	Gunung Jati	3		3	65	7	6	78	0	78
33	Pasaleman	1	1	2	25	0	0	25	16	41
34	Pabuaran	1	2	3	15	12	0	27	0	27
35	Tengah Tani	1	1	2	21	3	0		0	
36	Plered	3		3	14	0	0		0	
37	Gempol	1	1	2	43	2	0		0	
38	Greged	2	1	3	51	11	3		0	
39	Suranenggala	2	1	3						
40	Jamblang	2	1	3	16	6	5	27	0	27
JML		77	79	156	39	6	4	1.830	0	1.897

Profil Pendidikan data dasar 31 Agustus 2013

JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NO	KECAMATAN	NEGERI	SW AST A	JML	Ruang Kelas Milik menurut Kondisi				Ruan g Kelas	Ruan g Kelas
					Baik	R. Ringa n	R. Berat	Jml		
1	Waled	1		1	19	0	2	21	0	21
2	Ciledug	1	1	2	9	2	13	24	0	24
3	Losari	1	1	2	20	2	2	24	18	42
4	Babakan	1	1	2	27	5	3	35	0	35
5	Karang Sembung		1	1	0	0	0	0	0	0
6	Lemahabang	1	2	3	28	11	2	41	36	77
7	Sedong			0				0		0
8	Astana Japura	1		1	22	0	2	24	0	24
9	Mundu			0				0		0
10	Beber	1		1	12	3	5	20	0	20
11	Sumber	1		1	27	0	0	27	0	27
12	Palimanan	1	1	2	28	2	0	30	0	30
13	Plumbon	1	1	2	32	8	0	40	0	40
14	Weru		1	1	2	1	0	3	0	3
15	Kapetakan			0				0		0
16	Klangenan		1	1	0	3	3	6	0	6
17	Arjawinangun	1		1	15	7	3	25	25	50
18	Ciwaringin	1		1	20	0	0	20	0	20
19	Susukan	1	1	2	27	2	0	29	0	29
20	Gegesik	1	2	3	39	1	0	40	0	40
21	Susukan Lebak			0				0		0
22	Pabedilan	1	1	2	8	5	9	22	0	22
23	Dukupuntang	1	2	3	26	2	2	30	0	30
24	Panguragan		1	1	6	2	0	8	0	8
25	Kaliwedi			0				0		0
26	Pangenan			0				0		0
27	Gebang			0				0		0
28	Depok			0				0		0
29	Kedawung		4	4	29	5	0	34	0	34
30	Karangwareng	1		1	7	2	6	15	0	15
31	Talun			0				0		0
32	Gunung Jati			0				0		0
33	Pasaleman			0				0		0
34	Pabuaran			0				0		0
35	Tengah Tani		1	1	0	2	3	5	0	5
36	Plered			0				0		0
37	Gempol			0				0		0
38	Greged			0				0		0
39	Suranenggala	1		1	19	0	4	23	0	23
40	Jamblang	1		1	22	18	0	40	0	40
JML		19	22	41	444	83	59	586	79	665

Profil Pendidikan data dasar 31 Agustus 2013

JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NO	KECAMATAN	N	S	JML	Ruang Kelas Milik menurut Kondisi				Ruang Kelas	Ruang Kelas
					Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah		
1	Waled		1	1	1	2	3	6	2	8
2	Ciledug		2	2	27	0	0	27	0	27
3	Losari		1	1	0	0	0	0	0	0
4	Babakan		3	3	19	0	0	19	0	19
5	Karang Sembung			0				0		0
6	Lemahabang	1	4	5	79	10	7	96	0	96
7	Sedong		1	1	0	3	3	6	6	12
8	Astana Japura		5	5	30	10	0	40	1	41
9	Mundu	1	2	3	54	2	0	56	0	56
10	Beber		1	1	1	2	0	3	0	3
11	Sumber		3	3	36	4	4	44	0	44
12	Palimanan		4	4	65	6	2	73	0	73
13	Plumbon		3	3	12	0	0	12	7	19
14	Weru		4	4	52	8	0	60	0	60
15	Kapetakan		2	2	2	0	0	2	0	2
16	Klangenan			0				0		0
17	Arjawinangun		5	5	20	4	2	26	6	32
18	Ciwaringin		3	3	20	4	0	24	0	24
19	Susukan	1	1	2	28	5	0	33	0	33
20	Gegesik		5	5	25	13	2	40	0	40
21	Susukan Lebak		1	1	2	4	0	6	0	6
22	Pabedilan			0				0		0
23	Dukupuntang		7	7	37	2	0	39	7	46
24	Panguragan		1	1	3	0	0	3	0	3
25	Kaliwedi		2	2	3	2	4	9	3	12
26	Pangenan		2	2	5	3	0	8	0	8
27	Gebang	1	1	2	27	0	0	27	0	27
28	Depok		4	4	43	0	0	43	0	43
29	Kedawung	1	10	11	174	0	0	174	1	175
30	Karangwareng		1	1	6	0	0	6	0	6
31	Talun			0				0		0
32	Gunung Jati	1	1	2	13	0	0	13	0	13
33	Pasaleman			0				0		0
34	Pabuaran		2	2	28	2	0	30	0	30
35	Tengah Tani			0				0		0
36	Plered			0				0		0
37	Gempol		1	1	4	0	0	4	0	4
38	Greged		1	1	3	0	0	3	0	3
39	Suranenggala			0				0		0
40	Jamblang	1		1	42	0	0	42	0	42
JML		7	84	91	861	86	27	974	33	1.007

Profil Pendidikan data dasar 31 Agustus 2013

E. Manajemen pengelolaan pendidikan

Seiring bergulirnya era otonomi daerah dimana terdapat pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah sehingga membawa nuansa baru dalam sistem pengelolaan pendidikan di Kabupaten Cirebon.

Otonomi pendidikan memerlukan profesionalisme pengelolaan manajemen baik tingkat Kabupaten , kecamatan maupun tingkat sekolah. Sebagian besar pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen pendidikan di Kabupaten Cirebon sudah berjalan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti kinerja manajemen birokrasi pendidikan masih dirasa kurang sehingga tingkat efisien dan efektifitasnya masih rendah. Kurang tersedia data pendidikan yang akurat, tepat dan akuntabel, untuk itu perlu secepatnya dibangun sistem pendataan pendidikan yang terpadu antara Dinas sampai ke sekolah-sekolah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang handal.

Otonomi Daerah juga berdampak pada pengelolaan manajemen ditingkat sekolah yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah atau school based management. Saat ini seluruh sekolah di Kabupaten Cirebon telah melaksanakan MBS ditandai dengan adanya beberapa prinsip umum yang patut menjadi pedoman dalam pelaksanaan MBS diantaranya : sekolah telah memiliki visi, misi dan strategi kearah pencapaian mutu pendidikan, melibatkan partisipasi masyarakat, terbentuknya Komite Sekolah serta adanya transparansi dan akuntabilitas dimana sekolah beserta Komite Sekolah merupakan institusi terdepan yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan sekolah.

F. APK, APM

SEKOLAH DASAR (SD)

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Siswa				Jml. Siswa	Jml. Siswa Usia 07 - 12	Jumlah Anak Usia 07 - 12	APK (%)	APM (%)
		SD	SDLB	MI	P A					
1	Kec. Waled	5.399		754		6.153	5.646	5.361	114,77	105,31
2	Kec. Ciledug	5.113	30	384		5.527	5.012	5.373	102,87	93,29
3	Kec. Losari	4.661		2.310		6.971	6.252	7.066	98,66	88,48
4	Kec. Babakan	7.558		208		7.766	7.098	5.236	148,31	135,55
5	Karang Sembung	3.934		-		3.934	3.582	5.325	73,88	67,27
6	Lemah Abang	6.278	60	254	40	6.632	6.015	5.145	128,91	116,91
7	Kec. Sedong	4.380		210		4.590	4.227	5.409	84,86	78,15
8	Astana Japura	5.881		2.330	40	8.251	7.575	6.721	122,77	112,70
9	Kec. Mundu	6.939		1.383	20	8.342	7.556	5.254	158,78	143,81
10	Kec. Beber	4.692		-		4.692	4.298	5.074	92,47	84,71
11	Kec. Sumber	9.864		581		10.445	9.740	6.024	173,39	161,69
12	Kec. Palimanan	6.902	15	53	20	6.990	6.398	6.820	102,49	93,82
13	Kec. Plumbon	7.538		552	20	8.110	7.427	6.549	123,84	113,40
14	Kec. Weru	6.580		560	20	7.160	6.594	7.275	98,42	90,64
15	Kec. Kapetakan	5.966		939		6.905	6.249	6.533	105,69	95,65
16	Kec. Klangeran	5.341		138		5.479	5.074	6.914	79,24	73,39
17	Arjawinangun	7.129		1.003		8.132	7.465	4.686	173,53	159,30
18	Kec. Ciwaringin	3.637		302		3.939	3.528	5.422	72,65	65,06

19	Kec. Susukan	6.816		351		7.167	6.614	7.852	91,28	84,23
20	Kec. Gegecik	6.702		1.037	25	7.764	7.060	5.971	130,03	118,23
21	Susukan Lebak	3.644		878		4.522	4.107	5.657	79,94	72,60
22	Kec. Pabedilan	5.075		966		6.041	5.572	6.069	99,53	91,80
23	Dukupuntang	5.860		1.853		7.713	7.063	5.767	133,74	122,47
24	Panguragan	4.379		800		5.179	4.595	3.777	137,13	121,65
25	Kec. Kaliwedi	3.414		670		4.084	3.647	5.022	81,32	72,62
26	Kec. Pangenan	3.773		1.274	20	5.067	4.507	6.405	79,11	70,36
27	Kec. Gebang	6.534		254		6.788	6.140	6.527	104,00	94,06
28	Kec. Depok	6.161	65	286	20	6.532	5.908	5.826	112,12	101,40
29	Kec. Kedawung	4.737		135		4.872	4.459	4.021	121,16	110,89
30	Karang Wereng	2.821	30	130		2.981	2.600	5.239	56,90	49,62
31	Kec. Talun	6.172	165	702		7.039	6.348	6.438	109,33	98,60
32	Gunung Jati	6.479		1.077		7.556	6.857	4.359	173,35	157,31
33	Kec. Pasaleman	2.613		238		2.851	2.536	3.296	86,51	76,93
34	Kec. Pabuaran	3.643		217		3.860	3.516	3.761	102,63	93,47
35	Tengah Tani	4.438		-		4.438	4.001	4.356	101,89	91,85
36	Kec. Plered	6.671		-		6.671	6.116	4.608	144,76	132,73
37	Kec. Gempol	4.641		33		4.674	4.246	5.906	79,14	71,89
38	Kec. Greged	6.469		189		6.658	6.052	4.972	133,91	121,71
39	Suranenggala	4.708		162		4.870	4.439	4.113	118,41	107,93
40	Kec. Jamblang	3.944		219		4.163	3.742	3.757	110,82	99,61
	JUMLAH	217.487	365	23.432	225	241.509	219.855	219.886	109,83	99,99

Profil Pendidikan data dasar 31 Agustus 2013

JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

	Nama Kecamatan	Jumlah Siswa				Jml. Siswa	Jml. Siswa Usia 07 - 12	Jumlah Anak Usia 07 - 12	APK (%)	APM (%)
		SD	SDLB	MI	P A					
1	Kec. Waled	5.399		754		6.153	5.646	5.361	114,77	105,31
2	Kec. Ciledug	5.113	30	384		5.527	5.012	5.373	102,87	93,29
3	Kec. Losari	4.661		2.310		6.971	6.252	7.066	98,66	88,48
4	Kec. Babakan	7.558		208		7.766	7.098	5.236	148,31	135,55
5	Karang Sembung	3.934		-		3.934	3.582	5.325	73,88	67,27
6	Lemah Abang	6.278	60	254	40	6.632	6.015	5.145	128,91	116,91
7	Kec. Sedong	4.380		210		4.590	4.227	5.409	84,86	78,15
8	Astana Japura	5.881		2.330	40	8.251	7.575	6.721	122,77	112,70
9	Kec. Mundu	6.939		1.383	20	8.342	7.556	5.254	158,78	143,81
10	Kec. Beber	4.692		-		4.692	4.298	5.074	92,47	84,71
11	Kec. Sumber	9.864		581		10.445	9.740	6.024	173,39	161,69
12	Kec. Palimanan	6.902	15	53	20	6.990	6.398	6.820	102,49	93,82
13	Kec. Plumbon	7.538		552	20	8.110	7.427	6.549	123,84	113,40
14	Kec. Weru	6.580		560	20	7.160	6.594	7.275	98,42	90,64
15	Kec. Kapetakan	5.966		939		6.905	6.249	6.533	105,69	95,65
16	Kec. Klangeran	5.341		138		5.479	5.074	6.914	79,24	73,39
17	Arjawinangun	7.129		1.003		8.132	7.465	4.686	173,53	159,30
18	Kec. Ciwaringin	3.637		302		3.939	3.528	5.422	72,65	65,06
19	Kec. Susukan	6.816		351		7.167	6.614	7.852	91,28	84,23

20	Kec. Gegecik	6.702		1.037	25	7.764	7.060	5.971	130,03	118,23
21	Susukan Lebak	3.644		878		4.522	4.107	5.657	79,94	72,60
22	Kec. Pabedilan	5.075		966		6.041	5.572	6.069	99,53	91,80
23	Dukupuntang	5.860		1.853		7.713	7.063	5.767	133,74	122,47
24	Kec. Panguragan	4.379		800		5.179	4.595	3.777	137,13	121,65
25	Kec. Kaliwedi	3.414		670		4.084	3.647	5.022	81,32	72,62
26	Kec. Pangenan	3.773		1.274	20	5.067	4.507	6.405	79,11	70,36
27	Kec. Gebang	6.534		254		6.788	6.140	6.527	104,00	94,06
28	Kec. Depok	6.161	65	286	20	6.532	5.908	5.826	112,12	101,40
29	Kec. Kedawung	4.737		135		4.872	4.459	4.021	121,16	110,89
30	Karang Wereng	2.821	30	130		2.981	2.600	5.239	56,90	49,62
31	Kec. Talun	6.172	165	702		7.039	6.348	6.438	109,33	98,60
32	Kec. Gunung Jati	6.479		1.077		7.556	6.857	4.359	173,35	157,31
33	Kec. Pasaleman	2.613		238		2.851	2.536	3.296	86,51	76,93
34	Kec. Pabuaran	3.643		217		3.860	3.516	3.761	102,63	93,47
35	Tengah Tani	4.438		-		4.438	4.001	4.356	101,89	91,85
36	Kec. Plered	6.671		-		6.671	6.116	4.608	144,76	132,73
37	Kec. Gempol	4.641		33		4.674	4.246	5.906	79,14	71,89
38	Kec. Greged	6.469		189		6.658	6.052	4.972	133,91	121,71
39	Suranenggala	4.708		162		4.870	4.439	4.113	118,41	107,93
40	Kec. Jamblang	3.944		219		4.163	3.742	3.757	110,82	99,61
	JUMLAH	217.487	365	23.432	225	241.509	219.855	219.886	109,83	99,99

Profil Pendidikan data dasar 31 Agustus 2013

SEKOLAH MENENGAN (SMA, SMK)

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Siswa				Jml. Siswa		Siswa 16 - 18	Anak 16 - 18	APK (%)	APM (%)
		SMA	SMK	MA	SMLB	P. C	Seluruh				
1	Waled	692	327	-			1.019	800	1.013	100,59	78,97
2	Ciledug	799	1.208	-			2.007	1.461	784	255,99	186,35
3	Losari	787	332	137			1.256	1.063	1.392	90,23	76,36
4	Babakan	1.046	755	-			1.801	1.342	1.343	134,10	99,93
5	Karang Sembung	133	-	-		60	193	84	2.884	6,69	2,91
6	Lemahabang	1.613	3.983	-	6	30	5.632	4.603	3.826	147,20	120,31
7	Sedong	-	155	-		30	185	151	1.477	12,53	10,22
8	Astana Japura	788	1.602	505		30	2.925	2.183	1.486	196,84	146,90
9	Mundu	-	1.657	331		30	2.018	1.594	3.861	52,27	41,28
10	Beber	790	158	155		60	1.163	872	3.882	29,96	22,46
11	Sumber	749	1.472	214		30	2.465	1.949	2.134	115,51	91,33
12	Palimanan	970	2.642	1.260		60	4.932	3.704	4.004	123,18	92,51
13	Plumbon	864	559	173		30	1.626	1.274	1.099	147,95	115,92
14	Weru	56	2.794	1.467		60	4.377	3.349	1.844	237,36	181,62
15	Kapetakan	-	186	-		60	246	116	1.644	14,96	7,06
16	Klangenan	62	-	102		90	254	56	3.831	6,63	1,46
17	Arjawinangun	921	906	405		60	2.292	1.669	3.781	60,62	44,14
18	Ciwaringin	706	1.280	2.106		30	4.122	3.260	3.751	109,89	86,91
19	Susukan	920	1.265	77		30	2.292	1.964	1.098	208,74	178,87
20	Gegesik	1.255	1.491	158		60	2.964	2.160	3.788	78,25	57,02

21	Susukan Lebak	-	145	367			512	399	792	64,65	50,38
22	Pabedilan	708	-	833			1.541	1.377	3.741	41,19	36,81
23	Dukupuntang	1.071	2.764	265		30	4.130	2.901	3.730	110,72	77,77
24	Panguragan	168	36	-		30	234	157	2.804	8,35	5,60
25	Kaliwedi	-	424	-		30	454	330	1.731	26,23	19,06
26	Pangenan	-	190	338		30	558	341	3.754	14,86	9,08
27	Gebang	-	1.286	76		60	1.422	1.081	615	231,22	175,77
28	Depok	-	2.462	418		80	2.960	1.967	3.838	77,12	51,25
29	Kedawung	704	7.594	200		30	8.528	6.716	1.526	558,85	440,10
30	Karangwareng	537	221	-		30	788	644	514	153,31	125,29
31	Talun	-	-	-		30	30	-	4.099	0,73	0,00
32	Gunung Jati	-	677	214		30	921	775	4.360	21,12	17,78
33	Pasaleman	-	-	-		30	30	-	1.434	2,09	0,00
34	Pabuaran	-	1.709	786		30	2.525	1.612	1.693	149,14	95,22
35	Tengah Tani	131	-	-		60	191	110	1.491	12,81	7,38
36	Plered	-	-	-			-	-	3.255	0,00	0,00
37	Gempol	-	103	-		30	133	88	729	18,24	12,07
38	Greged	-	129	-		30	159	100	782	20,33	12,79
39	Suranenggala	659	-	-		30	689	511	1.352	50,96	37,80
40	Jamblang	844	1.762	-		60	2.666	2.286	910	292,97	251,21
	JUMLAH	17.973	42.274	10.587	6	1.280	72.240	55.049	91.930	78,58	59,88

Profil Pendidikan data dasar 31 Agustus 2013

G. AMH

PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS MENURUT KEMAMPUAN BACA TULIS
DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN CIREBON (HASIL SURVEI IPM TH 2012)
Laki-laki+Perempuan

No	Kecamatan	Kuantitas			Persentase		
		Bisa	Tidak Bisa	Jumlah	Bisa	Tidak Bisa	Jumlah
		N	N	N	%	%	%
1	010 WALED	38.532	2.667	41.199	93,53	6,47	100,00
2	011 PASALEMAN	18.661	850	19.511	95,64	4,36	100,00
3	020 CILEDUG	31.746	1.111	32.857	96,62	3,38	100,00
4	021 PABUARAN	25.366	1.352	26.718	94,94	5,06	100,00
5	030 LOSARI	38.903	2.319	41.222	94,37	5,63	100,00
6	031 PABEDILAN	37.380	2.687	40.067	93,29	6,71	100,00
7	040 BABAKAN	44.714	3.702	48.416	92,35	7,65	100,00
8	041 GEBANG	42.229	2.271	44.500	94,90	5,10	100,00
9	KARANGSEMBUNG	26.079	967	27.046	96,42	3,58	100,00
10	051 KARANGWARENG	20.620	612	21.232	97,12	2,88	100,00
11	060 LEMAHABANG	37.731	1.510	39.241	96,15	3,85	100,00
12	061 SUSUKAN LEBAK	27.065	1.576	28.641	94,50	5,50	100,00
13	070 SEDONG	28.586	2.225	30.811	92,78	7,22	100,00
14	080 ASTANAJAPURA	54.287	2.581	56.868	95,46	4,54	100,00
15	081 PANGENAN	30.970	1.996	32.966	93,95	6,05	100,00
16	090 MUNDU	52.356	2.771	55.127	94,97	5,03	100,00
17	100 BEBER	26.054	853	26.907	96,83	3,17	100,00
18	101 GREGED	33.899	3.844	37.743	89,82	10,18	100,00
19	111 TALUN	46.269	1.756	48.025	96,34	3,66	100,00
20	120 SUMBER	59.963	2.314	62.277	96,28	3,72	100,00
21	121 DUKUPUNTANG	44.805	2.113	46.918	95,50	4,50	100,00
22	130 PALIMANAN	40.553	2.586	43.139	94,01	5,99	100,00
23	140 PLUMBON	55.231	3.265	58.496	94,42	5,58	100,00
24	141 DEPOK	42.178	2.430	44.608	94,55	5,45	100,00
25	150 WERU	49.757	1.234	50.991	97,58	2,42	100,00
26	151 PLERED	36.699	2.811	39.510	92,89	7,11	100,00
27	161 TENGAH TANI	29.911	1.437	31.348	95,42	4,58	100,00
28	162 KEDAWUNG	48.969	962	49.931	98,07	1,93	100,00
29	171 GUNUNGJATI	57.844	3.340	61.184	94,54	5,46	100,00
30	180 KAPETAKAN	35.666	2.528	38.194	93,38	6,62	100,00
31	181 SURANENGGALA	29.879	2.383	32.262	92,61	7,39	100,00
32	190 KLANGENAN	37.289	3.223	40.512	92,04	7,96	100,00
33	191 JAMBLANG	26.333	1.517	27.850	94,55	5,45	100,00
34	200 ARJAWINANGUN	45.138	3.109	48.247	93,56	6,44	100,00
35	201 PANGURAGAN	30.616	2.776	33.392	91,69	8,31	100,00
36	210 CIWARINGIN	28.466	1.313	29.779	95,59	4,41	100,00
37	211 GEMPOL	30.967	2.423	33.390	92,74	7,26	100,00
38	220 SUSUKAN	46.005	2.491	48.496	94,86	5,14	100,00
39	230 GEGESIK	51.093	3.789	54.882	93,10	6,90	100,00
40	231 KALIWEDI	26.847	1.424	28.271	94,96	5,04	100,00
	Jumlah	1.515.656	87.118	1.602.774	94,56	5,44	100,00

Sumber data: Survey IPM tahun 2012

H. RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Ranking dan Kecamatan

No	Kecamatan	RLS	No	Kecamatan	RLS
1	TALUN	10,89	21	GEMPOL	6,35
2	KEDAWUNG	9,89	22	PALIMANAN	6,33
3	PLUMBON	8,25	23	CIWARINGIN	6,28
4	KLANGENAN	8,21	24	DEPOK	6,20
5	LEMAHABANG	8,00	25	BABAKAN	6,09
6	TENGAH TANI	7,84	26	ASTANAJAPURA	5,92
7	PABUARAN	7,82	27	SUSUKAN	5,92
8	PLERED	7,82	28	JAMBLANG	5,81
9	GUNUNGJATI	7,80	29	BEBER	5,79
10	KARANGWARENG	7,77	30	MUNDU	5,65
11	WERU	7,54	31	PANGENAN	5,58
12	ARJAWINANGUN	7,50	32	KAPETAKAN	5,58
13	DUKUPUNTANG	7,21	33	WALED	5,54
14	LOSARI	6,91	34	KALIWEDI	5,49
15	CILEDUG	6,90	35	GEGESIK	5,47
16	PASALEMAN	6,79	36	SEDONG	5,41
17	SUMBER	6,79	37	GEBANG	5,11
18	SURANENGGALA	6,72	38	PABEDILAN	5,07
19	KARANGSEMBUN G	6,60	39	PANGURAGAN	4,56
20	SUSUKAN LEBAK	6,50	40	GREGED	4,24
Kabupaten Cirebon					6,89

Sumber data : Survei IPM tahun 20012 Kabupaten Cirebon

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

3.1 TELAAHAN KEBIJAKAN

1. PERMASALAHAN

Pendidikan menjadi penentu kemajuan daerah. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Cirebon adalah rata-rata pendidikan masyarakat masih rendah. Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia, rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Cirebon masih berkisar pada 6,89 tahun. Ini menunjukkan tingkat melanjutkan sekolah masih rendah terutama pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) ke jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Dengan demikian wajib belajar pendidikan dasar masih belum tuntas. Selain itu, Kabupaten Cirebon masih menyisakan kisaran 87 ribu penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih belum melek huruf. Kemampuan melek huruf merupakan kemampuan dasar untuk menyerap pengetahuan dan ketrampilan. Dari sisi fasilitas gedung sekolah, Kabupaten Cirebon masih menghadapi kondisi ruang kelas yang membutuhkan banyak perbaikan. Sementara, dari aspek ketersediaan tenaga pendidik, Kabupaten Cirebon masih menyisakan tenaga pendidik yang tidak layak mengajar terutama dari sisi kualifikasi pendidikan tenaga pendidik. Berdasarkan uraian di atas, pembangunan daerah untuk mengejar ketertinggalan akan semakin sulit jika pembangunan sumber daya manusia tidak segera dilakukan percepatan perbaikan melalui pembangunan pendidikan.

2. TELAAHAN VISI MISI KDH

Visi misi dalam pembangunan Kabupaten Cirebon perlu diterjemahkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan yang spesifik. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran, dan program-program yang *inherent*. Kebijakan umum tersebut diantaranya:1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berakhlak mulia, melalui

kebijakan peningkatan penyelenggaraan pendidikan umum dan pendidikan agama.

3. TELAAHAN VISI MISI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Jawa Barat khusus bidang pendidikan yang akan dilaksanakan selama 2013 – 2018 adalah tercantum pada misi pertama :

Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Untuk mewujudkannya dibangun beberapa strategi diantaranya: menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan biaya terjangkau dengan arah kebijakan (1) pendidikan gratis Dasar dan Menengah (SD,SLTP, dan SLTA) dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas Dua Belas Tahun pada tahun 2018; (2) peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta pesantren (3) pendidikan terjangkau bagi anak- anak buruh dan TKI; (4) penyediaan beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlet berprestasi dan guru serta mahasiswa di PTN/PTS; (5) peningkatan akses transportasi sekolah di daerah terpencil, serta menuntaskan buta Aksara dengan arah kebijakan terwujudnya masyarakat Jawa Barat bebas dari buta aksara.

4. TELAAHAN VISI MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Hasil telaahan kebijakan pembangunan nasional yang terdapat pada *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014* terdapat beberapa prioritas pembangunan diantaranya:

Prioritas 2 : pendidikan, Tema: Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1). Menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan; 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

5. TELAAHAN RTRW

Pengembangan wilayah disusun berdasarkan rencana struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Kabupaten Cirebon memiliki beberapa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara, PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang akan dipromosikan menjadi PKL. Setiap PKL dan PKLp mempunyai peran dan fungsi berbeda. Adapun peran dan fungsi masing-masing PKL dan PKLp sebagai berikut:

PKL Ciledug dan PKLp Losari dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perikanan laut, perdagangan hasil pertanian, industri, pergudangan, pelabuhan, pelayanan sosial ekonomi, perumahan, pendidikan tinggi, perdagangan hasil pertambangan dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Ciledug meliputi Kecamatan Losari (PKLp); Pabedilan; Pabuaran; Waled; Babakan; Gebang; dan Pasaleman

PKL Lemahabang dan PKLp Astanajapura dengan fungsi utama sebagai industri manufaktur. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan industri, pertanian, perikanan laut, perumahan, pelayanan sosial, pariwisata, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pendidikan kejuruan, industri hasil hutan dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Lemahabang meliputi Astanajapura (PKLp); Mundu; Pangenan; Sedong; Susukanlebak; Karangsembung; dan Karangwareng

PKL Sumber dan PKLp Weru dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri, perikanan budidaya, pertambangan, dan pelayanan sosial ekonomi; Wilayah Pelayanan PKL Sumber meliputi Kecamatan Weru (PKLp); Beber; Greged; Plered; Tengahtani; Talun; Kedawung; dan Gunungjati.

PKL Palimanan dan PKLp Plumbon dengan fungsi utama sebagai sentra industry. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, pariwisata

sejarah, agro wisata, industri batu alam, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pertanian, perikanan budidaya, pelayanan sosial, pendidikan kejuruan, dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Palimanan meliputi Kecamatan Plumbon (PKLp); Klangeran; Jamblang; Depok; Dukupuntang; dan Gempol.

PKL Arjawinangun dan PKLp Kapetakan dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian tanaman pangan. Fungsi penunjangnya adalah perikanan tangkap dan budidaya, perumahan, agro wisata, industri, pendidikan tinggi, pelayanan sosial.

ANALISIS

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada diluar kendali organisasi tetapi mempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis tersebut digunakan teknis analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*) dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

3.2. Analisis lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang berpengaruh terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dimana di dalamnya mencakup (1) sumberdaya aparatur; (2) sarana dan prasarana; dan (3) organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Kekuatan

- a) Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon secara efisien dan efektif sehingga dapat berkompetisi di kancah global, hal ini telah dibuktikan

dengan diraihnya beberapa prestasi kejuaraan baik di dalam penguasaan mata peajaran, seni budaya maupun prestasi olahraga di tingkat Propinsi maupun Nasional.

- b) Adanya kesepakatan dari seluruh jajaran pendidikan untuk mendukung visi Kabupaten Cirebon dirumuskan dalam visi Dinas Pendidikan yang dapat dijadikan Akselerator peningkatan kesejahteraan masyarakat *melalui pembinaan pendidikan yang berkualitas guna mendukung visi Kabupaten Cirebon* ". Implementasi hal tersebut tercermin dalam program dan kegiatan yang selama ini digulirkan serta anggaran pendidikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
- c) Tersedianya sumberdaya aparatur pendidik dan kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan di era globalisasi sekarang ini.
- d) Tersedianya sarana dan prasarana yang siap untuk dikembangkan guna menghadapi tantangan perkembangan IPTEK dan dunia global, hal ini dapat dilihat dari aset yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran, gedung persekolahan, mesin-mesin, perbengkelan, ketersediaan lahan yang senantiasa siap untuk dibangun dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- e) Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan bahkan sampai pada tingkat Sekolah dan masyarakat Siap melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan, pengambilan kebijakan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran.

3.2.2.Kelemahan

- a) Belum terbangunnya koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antar lini, unit dan institusi pendidikan di dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya ego sektoral serta bervariasinya kemampuan SDM aparatur maupun kemampuan daya beli masyarakat yang

- seringkali menjadi kendala di dalam pembangunan di bidang pendidikan.
- b) Belum seragamnya pemahaman aparaturnya terhadap tugas dan fungsinya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dalam melaksanakan tugas kedinasan dan memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena terjadinya penyimpangan terhadap komitmen yang disepakati sehingga menjadi kendala terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan.
 - c) Belum efektifnya rentang kendali dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, hal ini disebabkan karena : (a) Penegakkan hukum tidak/kurang tegas; (b) besarnya populasi persekolahan yang harus diawasi; (c) kurangnya keterlibatan aparaturnya pendidikan yang ada di lapangan dalam melaksanakan pengawasan; dan (d) kurangnya dukungan dana dan fasilitas operasional.
 - d) Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan, hal ini disebabkan karena: (a) besarnya populasi persekolahan yang tersebar sampai di pelosok desa; (b) kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya kehadiran data bagi perencanaan dan pengawasan; (c) belum terbangunnya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi dari tingkat Kabupaten sampai ke sekolah-sekolah sebagai sumber data primer; dan (d) kurangnya dukungan dana operasional dan teknologi sehingga mengakibatkan perencanaan menjadi tidak matang dan pengawasan tidak efektif.

3.3. Analisis Lingkungan Eksternal

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada diluar kendali organisasi tetapi mempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis tersebut digunakan teknis analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*) dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan.

3.3.1 Peluang

- a) Media massa elektronik maupun cetak yang berskala lokal, regional maupun nasional banyak terdapat di Kabupaten Cirebon, hal ini perlu dijadikan peluang yang efektif bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program-program kepada masyarakat secara luas. Untuk itu keberadaan media ini perlu dimanfaatkan dengan baik dan efektif melalui jalinan kerjasama yang saling menguntungkan.
- b) Adanya kepedulian masyarakat, pengusaha terhadap pendidikan dan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pembangunan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat (stakeholders) menyambut penerapan inovasi-inovasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang difasilitasi melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Badan Akreditasi Sekolah (BAS), *Broad Based Education (BBE) and Life Skill* serta gerakan-gerakan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan mulai dari pembentukan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), kemudian menjadi Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), Dewan Pendidikan (DP)/ Dewan Sekolah, sampai kepada Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP).
- c) Posisi geografis Kabupaten Cirebon yang merupakan lintasan antar propinsi-propinsi di Indonesia memiliki nilai strategis untuk menjadi pintu gerbang dan cermin pendidikan bukan hanya pada skala propinsi tapi juga pada skala Nasional. Hal ini menjadi peluang besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk melaksanakan pembangunan pendidikan secara akseleratif dan berkesinambungan.

3.3.2 Tantangan

- a) Kabupaten Cirebon sebagai tempat tujuan untuk mencari kerja/nafkah seiring pertumbuhan dunia industri mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini menjadi tugas berat jajaran pendidikan di Kabupaten Cirebon guna menuntaskan program-program pendidikan, khususnya Rintisan Wajar 12 Tahun karena semakin besarnya populasi penduduk yang harus dilayani.
- b) Geografis Kabupaten Cirebon yang cukup luas dan masih terdapat beberapa daerah terpencil. Hal ini telah menyebabkan tidak meratanya

penyebaran pelayanan pendidikan sehingga menjadi tantangan berat di dalam melakukan inovasi dan akselerasi pendidikan.

- c) Kendala budaya tradisional dan pengaruh negatif budaya luar menimbulkan permasalahan yang kompleks di dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon, hal ini menuntut penanganan tersendiri melalui pendekatan-pendekatan khusus agar pembangunan pendidikan bisa berjalan secara sinergis dan serentak. Dalam posisi pendidikan yang merupakan kebutuhan dan perhatian semua orang, menjadi primadona dalam pencapaian IPM 80 serta dibebani dampak reformasi yang keablasan, mengakibatkan banyak pihak berkeinginan dan memaksakan diri untuk ikut campur mengawasi pelaksanaan pembangunan pendidikan tanpa mau mengerti permasalahan internal kelembagaan. Hal ini menjadi beban berat bagi jajaran pendidikan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan secara efisien dan efektif karena terlalu banyak campur tangan pihak luar terhadap pengelolaan pendidikan. Hal ini berdampak besar terhadap aspek psikologis para aparatur di dalam bekerja dan meningkatkan kinerjanya.

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi umumnya dapat dikenadalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi tetapi mempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan Strategis digunakan teknis analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat) dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

3.4 Permasalahan yang dihadapi

Semakin hari permasalahan pendidikan bukannya semakin berkurang, justru permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan tuntutan globalisasi segala penjuru kehidupan dimana filter tidak lagi dapat membendung sisi negatif dari seluruh interaksi setiap individu. Secara garis besar permasalahan pendidikan setidaknya dapat diklasifikasikan kedalam 3 pokok masalah sebagaimana uraian dibawah ini.

3.4.1 Peningkatan Akses dan pemerataan pendidikan

- a) Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung sekolah ;
- b) Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah;
- c) Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;
- d) Masih adanya kendala budaya dan/atau tradisi di dimasyarakat yang menganggap kurang pentingnya pendidikan;
- e) Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan daya belinya masih rendah.

3.4.2 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

- a) Kurang meratanya tingkat profesionalisme guru dalam strategi pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan.
- b) Terdapat kesenjangan fasilitas sarana penunjang pembelajaran, seperti perpustakaan, laboratorium serta media pembelajaran lainnya belum merata pada seluruh sekolah;
- c) Media belajar siswa dan media penampilan hasil belajar siswa belum mendapat perhatian baik di setiap sekolah;
- d) Internet sebagai sumber belajar belum optimal diberdayakan dengan baik;
- e) Kebijakan dan implementasi kebijakan pengembangan perpustakaan
- f) kolaborasi dalam pembaruan kegiatan belajar melalui kerja sama antara guru belum berkembang dengan baik sebagai bagian dari dinamika budaya kerja;
- g) belum tercipta kegiatan yang dapat menampilkan produk karya secara kompetitif untuk guru;
- h) belum ditetapkan standar mutu yang menjadi indikator pencapaian program;
- i) belum terdapat kebijakan untuk menetapkan kendali mutu yang merupakan rencana implementasi kebijakan tingkat nasional
- j) Lulusan sekolah kurang memiliki ketrampilan dan kecakapan hidup;

3.4.3 penguatan Tata Kelola dan Pencitraan Publik

- a) kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah;
- b) Belum tersedia data pendidikan yang akurat disebabkan belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan;
- c) Belum terbangunnya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi sebagai sumber data primer;
- d) Belum optimumnya Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah., kelompok kerja guru/MGMP dan supervisi kinerja guru;
- e) Sistem perencanaan yang berkembang dalam bentuk penyusunan rencana strategis dan program tahunan pada tingkat sekolah belum berkembang baik;
- f) proses pelaksanaan tugas yang berbasis perencanaan masih sangat lemah;
- g) Belum optimumnya fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah untuk meningkatkan mutu pengorganisasian yang lebih efektif.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI

Visi Dinas Pendidikan mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Cirebon dan merupakan komitmen (keinginan dan cita-cita) segenap jajaran Pengelola dan Pemerhati Bidang pendidikan di Kabupaten Cirebon. Visi tersebut merupakan kesimpulan dari hasil serangkaian pembahasan yang melibatkan unsur-unsur pengelola dan pemerhati pendidikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon.

Visi pendidikan dirumuskan dengan sepenuhnya memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi-kondisi nyata serta permasalahan pendidikan di Kabupaten Cirebon, dan untuk pencapaiannya harus dilakukan melalui penggalan, pengerahan dan pengembangan potensi-potensi bidang pendidikan yang ada agar dapat membelikan pelayanan pendidikan yang bermutu sehingga berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon.

Keberhasilan pencapaian visi Dinas pendidikan diukur dengan tingkat pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) ditandai dengan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pencapaian IPM di Kabupaten Cirebon.

Pemikiran-pemikiran di atas menjadi dasar penetapan visi Dinas Pendidikan dalam rangka pengelolaan pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Visi tersebut adalah “ **TERSELENGGARANYA LAYANAN PRIMA PENDIDIKAN UNTUK MEMBENTUK MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG CERDAS DAN KOMPETITIF** “

Visi tersebut menggambarkan cita-cita masyarakat Kabupaten Cirebon untuk meraih kecerdasan dan kompetisi yang setinggi-tingginya. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan verbal, kecerdasan matematis, kecerdasan

visual spasial, kecerdasan kinestetis, kecerdasan musikal, kecerdasan inter personal, kecerdasan intra personal dan kecerdasan natural (multiple intelegence) serta memiliki jiwa kompetitif.

Pengertian Cerdas dan Kompetitif

Cerdas dan Komprehensif	
Multiple Intelegence	<ul style="list-style-type: none"> • Kecerdasan Verbal Beraktualisasi diri melalui kecerdasan menggunakan kata-kata dan bahasa untuk mengekspresikan makna, ide atau gagasan-gagasan. • Kecerdasan Matematis Beraktualisasi diri melalui kecerdasan penggunaan logika untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta operasi-operasi matematika. • Kecerdasan Visual Spasial Beraktualisasi melalui penggunaan kecerdasan olah bentuk dan ruang tiga dimensi. • Kecerdasan Kinestetis – Fisik Beraktualisasi melalui penggunaan kecerdasan olah fisik. • Kecerdasan Musikal Beraktualisasi melalui penggunaan kecerdasan sensitivitas terhadap pola titinada, melodi, ritme dan nada. • Kecerdasan Inter – Personal Beraktualisasi diri melalui pemahaman dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain (Learning to life together). • Kecerdasan Intra – Personal Beraktualisasi diri untuk memahami diri sendiri dan

Cerdas dan Komprehensif	
	<p>pengendalian diri untuk menumbuhkan/memperkuat keimanan dan ketaqwaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecerdasan Natural <p>Beraktualisasi diri melalui kemampuan mengobservasi pola – pola alam dan memahami sistem alamiah atau sistem buatan manusia.</p>
Kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> • Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, bersahabat dengan perubahan, inovatif, menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global, pembelajar sepanjang hayat.

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan di era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan pada masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

Di dalam masyarakat berbasis pengetahuan, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dominan. Masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan Iptek sebagai penggerak utama (*prime mover*) perubahan masyarakat. Pendidikan memfasilitasi peningkatan indeks teknologi tersebut, namun demikian, peningkatan indeks teknologi tidak semata-mata ditentukan oleh pendidikan, melainkan juga oleh transfer teknologi yang biasanya menyertai investasi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus sinkron dengan kebijakan investasi.

Untuk itu, pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi teknologi maju, sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman. Pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif.

Pendidikan juga menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa. Pendidikan yang menumbuhkan jiwa kemandirian menjadi sangat penting justru ketika dunia dihadapkan pada satu sistem tunggal yang digerakkan oleh pasar bebas. Bangsa Indonesia sulit bertahan jika tidak memiliki kemandirian karena hidupnya semakin tergantung pada bangsa-bangsa yang lebih kuat. Selain itu, pendidikan harus menjadi bagian dari proses perubahan bangsa menuju masyarakat madani, yakni masyarakat demokratis, taat, hormat, dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan, melestarikan keseimbangan lingkungan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

4.2 MISI

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik;
2. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten;
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan;
4. Meningkatkan tatakelola layanan pendidikan.

Adapun penjelasan dari Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik
Tuntutan dunia global diantaranya layanan pendidikan yang bermutu. Kata bermutu di atas mengandung makna sangat kompleks seiring dengan kompleksnya peserta didik itu sendiri, karena salah satu tugas guru harus dapat memanusiakan manusia.

Layanan pendidikan yang bermutu meliputi 1) Sumber Daya Manusia/SDM, 2) sarana prasarana serta 3) manajemen pendidikan.

SDM pendidikan atau guru menempati posisi sangat penting dalam menjembatani transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan potensi siswa sesuai bakat, minat yang dimiliki. Oleh karena itu agar terselenggaranya pendidikan yang bermutu, perlu adanya guru yang profesional ditandai dengan kualifikasi pendidikan S1, tersertifikasi, memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

Kurikulum pendidikan dari waktu ke waktu mengalami perubahan sesuai perkembangan dan sebagai bentuk upaya penyempurnaan diberbagai bidang. Tahun 1947 disebut Rencana Pelajaran berkembang terus sampai pada tahun 1984 dinamakan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan terakhir tahun 2013 Kurikulum 2013 (KURTILAS).

Begitu pentingnya sehingga kurikulum selalu mengalami perubahan dengan tujuan dapat memaksimalkan hasil pendidikan dengan cara menjalankannya sesuai aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten

Salah satu penentu kegiatan pembelajaran adalah guru. Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses berlangsungnya pendidikan. Guru hendaknya memiliki kemampuan untuk membentuk manusia cerdas dalam memahami, mencerna dan melakukan berbagai hal, membentuk pribadi yang memiliki jati diri bangsa, sehingga kelak kemudian hari mampu mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai potensi yang dikuasai sehingga pembangunan pendidikan dapat terwujud dengan sempurna karena diisi oleh generasi muda yang berkualitas.

Selain kualifikasi guru, jumlah gurupun hendaknya mencukupi untuk semua jenjang pendidikan. Rasio guru SD sama dengan 1 orang guru berbanding 1 rombongan belajar, untuk jenjang SMP, SMA dan SMK 24 jam pelajaran tersedia 1 orang guru serta pelajaran yang diampu sesuai dengan basic yangdimilikinya.

3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan

Sarana prasarana untuk menunjang terselenggaranya layanan pendidikan juga sangat penting dan menentukan. Upaya untuk memenuhi sarana prasarana dengan melakukan pembengunan USB, ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan sekolah, alat peraga pendidikan dan lain-lain menuju tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai Kepmenpan nomor 25 tahun 2004.

4. Meningkatkan tatakelola layanan pendidikan

Manajemen pendidikan tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolektng data saswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu realisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

4.3 TUJUAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

4.3.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas peserta didik

Meningkatkan kuantitas peserta didik adalah upaya secara terus menerus yang dilakukan melalui intensifikasi komunikasi formal maupun informal baik di tataran internal maupun eksternal kedinasan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Disamping itu upaya pemerataan dan perluasan akses dengan cara pengembangan model

pendidikan baik formal maupun non formal. Untuk keberhasilan hal tersebut perlu dibangun tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan dan partisipasi dari semua komponen yang ada. Meningkatkan kualitas peserta didik adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus melalui inovasi pembelajaran sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang tinggi ditandai oleh tingkat pencapaian angka kelulusan, rendahnya angka mengulang dan lain - lain.

4.3.2 Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan adalah upaya yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pembinaan secara terus menerus baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan melalui pelatihan teknis pengelolaan pendidikan agar dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja serta memiliki integritas dan kompetensi unggul dalam rangka menciptakan masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif.

4.3.3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sara dan prasarana pendidikan

Memenuhi standar nasional sarana dan prasarana adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang harus tersedia dalam rangka kegiatan belajar mengajar melalui pembangunan gedung kantor, sekolah, ruang kelas, laboratorium serta ruang penunjang lainnya, alat bantu pembelajaran seperti buku teks pelajaran, alat peraga dan lain-lain baik secara kuantitas maupun kualitas.

4.3.3.1 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tatakelola pendidikan

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin,

sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu.

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu.

4.4 SASARAN STRATEGIS

Berdasar pada Visi, Misi dan Tujuan, beberapa sasaran ditargetkan untuk direalisasikan melalui program/kegiatan sesuai skala prioritas.

4.4.1 Meningkatnya Indeks Pendidikan

Pembangunan manusia kian mendapat perhatian dari penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah. Indikasinya, pembangunan manusia dimanifestasikan dalam bentuk indeks pembangunan manusia atau IPM.

Adanya target IPM dalam rencana pembangunan selayaknya disambut positif karena IPM merupakan gambaran tingkat kemampuan sumber daya manusia yang terukur. Target IPM harus obyektif dan rasional. Indikator yang mendasari IPM perlu diupayakan secara sungguh-sungguh baik oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sehingga target yang telah dicanangkan dapat tercapai. Indikator tersebut adalah angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH).

Berdasarkan data hasil survey IPM tahun 2012 RLS Kabupaten Cirebon baru mencapai 7,01 tahun dan sasaran tahun 2019 ditargetkan mencapai 8,03 tahun. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2019 masyarakat Kabupaten Cirebon minimal sudah mendekati tamat SMP sederajat.

Sedangka AMH Kabupaten Cirebon tahun 2012 menunjukkan angka 93,52% dan ditargetkan tahun 2019 sebesar 95,74%.

4.4.2 Meningkatnya kesempatan dan pemerataan pendidikan

Pemerataan pendidikan adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk memperoleh pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Program *Education for All* (Pendidikan Untuk Semua/PUS) menghendaki tidak ada seorang pun masyarakat Kabupaten Cirebon yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan dan sistem rekrutmen peserta didik harus mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat pada setiap jenjang dan jalur pendidikan serta tidak mempersulit dan memberatkan masyarakat.

Disamping itu perlu dibangun pelayanan pendidikan yang dapat dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat terkait dengan beberapa hal seperti biaya, waktu dan tempat penyelenggaraan, serta sistem informasi yang mudah diakses sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan.

Sosialisasi berbagai model pelayanan pendidikan harus menyentuh langsung pada sasaran tidak hanya dilakukan oleh pengelola pendidikan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan sehingga tercipta jalur – jalur strategis memperoleh pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan adalah salah satu faktor penentu bagi semua jalur dan jenjang pendidikan dalam memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat menjangkau sampai kedaerah terpencil sekalipun.

4.4.3 Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan

Mutu, relevansi dan daya saing adalah hal yang tak dapat dipisahkan dalam kegiatan pelayanan pendidikan, tidak jarang harapan untuk meningkatkan kualitas hidup

melalui bangku pendidikan adalah jalan satu-satunya yang dipercaya dapat mewarnai keberhasilan dalam berbagai kesempatan memperoleh pekerjaan.

Namun demikian peningkatan mutu masih terus harus dipacu mengingat masih rendahnya mutu pendidikan yang ditandai dengan rendahnya nilai jual lulusan bahkan terhadap pekerjaan tertentu tanda bukti kelulusan / izazah tidak dijadikan barometer akibatnya sebagian orang berpendapat bahwa sekolah hanyalah perbuatan sia-sia, membuang waktu dan kesempatan karena dengan menempuh pendidikan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap dirinya.

Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan teknis seperti pelaksanaan MGMP dan sejenisnya serta pelatihan yang diberikan langsung terhadap peserta didik perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dengan melibatkan nara sumber yang berkompeten sehingga secara bertahap dapat meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing untuk dapat menapaki pintu gerbang globalisasi.

4.4.4 Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan

Meningkatkan mutu/kualitas tenaga pendidik dan kependidikan adalah upaya yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pembinaan secara terus menerus baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan melalui pelatihan teknis pengelolaan pendidikan agar dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja serta memiliki integrasi dan kompetensi unggul dalam rangka menciptakan masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif.

4.4.5 Meningkatnya mutu dan jumlah sarana prasana pendidikan

Memenuhi standar nasional sarana dan prasarana adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang harus tersedia dalam rangka kegiatan belajar mengajar melalui pembangunan gedung kantor, sekolah, ruang kelas, laboratorium serta ruang penunjang lainnya, alat bantu pembelajaran seperti buku teks pelajaran, alat peraga dan lain-lain baik secara kuantitas maupun kualitas.

4.4.6 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu.

4.4.7 Meningkatnya peran serta masyarakat

Peranserta masyarakat diwujudkan dengan dibentuknya komite sekolah pada setiap satuan pendidikan. Komite sekolah diharapkan dapat bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas pendidikan dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Upaya untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat diwujudkan melalui sosialisasi, pembinaan komite sekolah, forum masyarakat peduli pendidikan serta kegiatan lain yang memberikan tambahan wawasan dan pemahaman tentang peran masyarakat dan komite sekolah dalam pengelolaan pendidikan.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

VISI MISI TUJUAN SASARAN TAHUN 2014 – 2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN						
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta didik;	Meningkatnya indeks pendidikan	Indeks Pendidikan	77,9	79,44 - 80,04	80,33 - 81,6	81,89 - 82,93	83,22 - 84,27	84,56 - 85,60	85,89 - 86,67
Indeks Pendidikan (IP Min)			77,9	79,44	80,33	81,89	83,22	84,56	85,89	
Indeks Pendidikan (IP Maks)			77,9	80,04	81,60	82,93	84,27	85,60	86,67	
Angka melek huruf			93,5	93,89	94,26	94,63	95	95,37	95,74	
AMH Min			93,5	94,5	95,5	96,5	97,5	98,5	99,5	
AMH Maks			93,5	95,4	96,4	97,4	98,4	99,4	100,0	
Angka rata-rata lama sekolah			6,89	7,01	7,4	7,5	7,9	8,2	8,5	
RLS Maks			7,00	7,40	7,5	7,9	8,2	8,5	8,8	
RLS Min			6,89	7,18	7,35	7,52	7,69	7,86	8,03	
		Meningkatnya kesempatan dan pemerataan pendidikan	MELEK HURUF AL-QUR'AN							
SD (%)				30	38	46	54	62	70	
SMP (%)				40	47	54	61	68	75	
SMA (%)				45	52	59	66	73	80	
SMK (%)				45	52	59	66	73	80	
APK										
PAUD (%)				33,5	34,6	35,6	36,7	37,8	38,9	40
SD (%)				110	110	110	109	109	109	109
SMP (%)				111	111	110	110	110	110	110
SM (%)				78,6	79,06	79,54	80,02	80,5	80,98	81

		APM							
		SD (%)	99,90	99,91	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96
		SMP (%)	89,30	89,5	89,7	89,9	90,1	90,3	90,50
		SM (%)	59,88	60,39	60,84	61,32	61,8	62,28	62,76
		ANGKA LULUSAN (AL)							
		SD (%)	100	100	100	100	99,9	99,9	99,9
		SMP (%)	100	100	100	100	99,9	99,9	99,9
		SMA (%)	100	100	100	100	99,9	99,9	99,9
		SMK (%)	99,51	99,6	99,6	99,7	99,8	99,8	99,9
	Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan	ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS)							
		SD (%)	2,3	2,29	2,28	2,27	2,26	2,25	2,24
		SMP (%)	0,24	0,23	0,22	0,21	0,2	0,19	0,18
		SMA (%)	0,68	0,66	0,64	0,62	0,6	0,58	0,56
		SMK (%)	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12
		ANGKA MENGULANG							
		SD (%)	0,13	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08	0,07
		SMP (%)	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41
		SMA (%)	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31
		SMK (%)	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,4	0,39
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;	Meningkatnya mutu tenaga pendidik	GURU LAYAK MENGAJAR							
		SD (%)	78	81	81,5	82	82,5	83	83,5
		SMP (%)	94,4	95	95,5	96	96,5	97	97,5
		SMA (%)	95,8	96,3	96,5	96,8	97	97,3	97,5
		SMK (%)	94,51	94,8	95	95,3	95,5	95,8	96

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatnya mutu dan jumlah sarana prasarana pendidikan	RASIO SISWA / SEKOLAH							
		SD (%)	229	230	232	234	236	238	240
		SMP (%)	493	501	509	516	524	532	540
		SMA (%)	438	455	472	489	506	523	540
		SMK (%)	465	478	490	503	515	528	540
		RASIO ROMBEL/RUANG KELAS							
		SD (Rombel/R. Kelas) %	1,29	1,28	1,27	1,26	1,25	1,24	1,23
		SMP (Rombel/R. Kelas) %	1,63	1,43	1,41	1,39	1,37	1,35	1,33
		SMA (Rombel/R. Kelas) %	0,89	0,9	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95
		SMK (Rombel/R. Kelas) %	1,17	1,15	1,13	1,11	1,09	1,07	1,05
		RASIO SISWA/KLS (S/K)							
		SD	28	28,7	29,3	30	30,7	31,3	32
		SMP	23	25,2	27,3	29,5	31,7	33,8	36
		SMA	35	35,2	35,3	35,5	35,7	35,8	36
		SMK	37	36,8	36,7	36,5	36,3	36,2	36
		RUANG KELAS BAIK							
		SD (%)	69	70	71	72	73	74	75
		SMP (%)	77,9	78,2	78,6	78,9	79,3	79,6	80
		SMA (%)	75,8	77,3	78,8	80,4	81,9	83,5	85
SMK (%)	88,4	88,7	88,9	89,2	89,5	89,7	90		

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tatakelola pendidikan;	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan	MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH							
		SD (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		SMP (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		SMA (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		SMK (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Meningkatnya peran serta masyarakat	KOMITE SEKOLAH							
		SD (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		SMP (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		SMA (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		SMK (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2014—2019 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis serta RPJMD Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2013. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development*.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2014--2019 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan khususnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan. Kebutuhan tersebut mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keterjangkauan atau pendanaan, pembelajaran dan penilaian, dan tata kelola manajemen pendidikan.

5.1 STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu.

5.1.1 Penyediaan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru kelas mengampu mata pelajaran untuk satu rombongan belajar, sedangkan guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Guru tersebut wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.

Apabila diamati secara seksama, guru negeri (PNS) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK terdapat kekurangan. Selain itu tidak meratanya sebaran guru menambah parah gap antara sekolah yang satu dengan lainnya.

Penataan guru mutlak perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan jumlah rombel atau jumlah jam pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan.

Strategi yang dibangun dalam mengatasi kesenjangan jumlah guru adalah dengan menggunakan data Dapodik sebagai basis satu-satunya data dalam seluruh program dan kegiatan. Dari data tersebut dibangun aplikasi yang dapat memcerminkan berapa jumlah rombel dan berapa guru yang ada sehingga diketahui berapa kekurangan guru di sekolah tersebut. Begitu juga untuk jenjang SMP, SMA, SMK berapa guru mata pelajaran tertentu dibutuhkan disekolah tertentu sehingga Dinas Pendidikan dapat mengambil kebijakan untuk langkah selanjutnya.

Langkah pintas yang dapat dilakukan adalah dengan menunjuk guru honorer untuk memenuhi kekurangan tersebut agar pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya.

5.1.2 Penyediaan dan Sara Prasarana Pendidikan

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Satu Desa/Kelurahan dilayani minimal satu satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), serta dalam satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SD dengan 6 Rombongan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 1.340 m², sedangkan luas bangunan minimal 400 m².

Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP yang dapat menampung semua lulusan SD di kecamatan tersebut serta satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SMP dengan 3 Rombongan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 1.440 m², semakin banyak jumlah rombongan semakin bertambah luas lahan yang mesti disediakan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan luas bangunan minimal 430 m² untuk bangunan lantai satu, dan semakin besar jumlah rombongan semakin luas pula bangunan yang mesti disediakan.

Satu SMA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Satu SMA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA baru. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SMA dengan 3 Rombongan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 2.170 m², semakin banyak jumlah rombel semakin bertambah luas lahan yang mesti disediakan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan luas bangunan minimal 650 m² untuk bangunan lantai satu, dan semakin besar jumlah rombel semakin luas pula bangunan yang mesti disediakan.

5.1.3 Penyediaan Layanan Untuk Meningkatkan Keterjangkauan

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan murah dan berkualitas merupakan mandat sesuai tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan Pasal 31 Ayat (1) mengamanatkan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat (1) dan (2) menegaskan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Untuk merealisasikannya maka Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon membangun strategi pelayanan untuk pendidikan jalur formal/non formal sebagai berikut.

- a) Penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten merata di seluruh wilayah kabupaten Cirebon meliputi pemenuhan guru TK, SD, SMP, SMA, SMK serta tutor Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompeten;
- b) Penyediaan manajemen TK, SD, SMP, SMA, SMK serta Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompeten merata di seluruh wilayah kabupaten

Cirebon meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi;

- c) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu, serta keterlaksanaan akreditasi;
- d) Penyediaan dana BOS serta subsidi lainnya untuk meningkatkan keterjangkauan layanan.

5.1.4 Penyediaan dan Pengembangan Sistem Pembelajaran

Penyediaan dan Pengembangan Sistem Pembelajaran terdiri dari beberapa Komponen yang berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar diantaranya:

a) Tujuan Pembelajaran

Langkah pertama proses belajar mengajar ialah penentu tujuan. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai siswa setelah menyelesaikan suatu konsep pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran umum telah ditulis dalam Garis-Baris Besar Program Pengajaran (GBPP). Komponen tujuan pembelajaran adalah suatu tahap kegiatan belajar mengajar yang turut memecahkan problem pengajaran.

b) Murid

Murid adalah orang yang melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Murid dalam suatu kelompok harus memiliki karakteristik yang relatif sama. Untuk penentuan karakteristik lazim digunakan empat teknik penentuan karakteristik siswa, mengkaji dokumen, tes, wawancara, dan observasi.

c) Guru

Guru adalah orang yang menggerakkan suatu proses belajar. Tanpa profesionalisme suatu proses belajar mengajar tidak mungkin mencapai hasil yang baik. Keberadaan guru yang profesional mutlak menjadi dasar pengembangan sistem pembelajaran.

d) Konsep Pembelajaran

Konsep pembelajaran mengandung berbagai materi pembelajaran yang harus dikaji warga belajar. Dengan menguasai sejumlah konsep pembelajaran berarti siswa memiliki modal untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Konsep pembelajaran harus dikembangkan jadi

bahan pembelajaran yang memungkinkan warga belajar memperoleh macam-macam materi pembelajaran yakni fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Dengan adanya pengembangan bahan pembelajaran yang teruji memungkinkan proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik.

e) Pendekatan/Metode/Teknik

Pendekatan berupa suatu pendapat tentang pengajaran bahasa yang didasari falsafah tentang bahasa dan pengajaran bahasa, seperti pendekatan komunikatif dan pendekatan alamiah. Teknik pembelajaran digunakan untuk mengurutkan setiap langkah kegiatan. Teknik yang dapat digunakan seperti pemberian, penjelasan, diskusi. Pendekatan dan metode maupun teknik merupakan subsistem yang digunakan dalam pembelajaran.

f) Media/Alat peraga

Penyampaian materi pembelajaran memerlukan media suatu alat. Alat yang digunakan dalam pembelajaran disebut media belajar (alat peraga). Alat ini digunakan hanya untuk membantu memperjelas siswa kepada hal-hal yang memang belum jelas. Media membentuk warga belajar terhindar dari verbalisme, karena sesuatu yang dikatakan ditunjukkan dengan bendanya atau tiruannya.

g) Evaluasi

Evaluasi digunakan untuk mengukur kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) warga belajar setelah mengkaji konsep pembelajaran. Evaluasi yang dilaksanakan dapat berupa evaluasi lisan, evaluasi tulisan, dan evaluasi perbuatan. Evaluasi dapat dilaksanakan dengan pertanyaan tulisan yang di jawab dengan lisan, atau pertanyaan lisan dijawab dengan lisan. Evaluasi tulisan diharapkan warga belajar menjawab dengan tulisan. Evaluasi perbuatan menekankan warga belajar untuk melakukan suatu kegiatan berupa motorik (gerak), seperti mengekspresikan suatu adegan bagian drama, menunjukkan perilaku senang/susah/sedih, dan sebagainya.

5.1.5 Penyediaan dan Pengembangan Layanan Data dan Informasi Pendidikan

Layanan data dan informasi pendidikan melalui proses kolektif data, pengolahan data, produksi data dan pendayagunaan data. Seiring dengan laju perkembangan teknologi informasi, proses tersebut tidak hanya dilakukan dengan cara manual, tetapi mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi melalui pembangunan sistem layanan data dan informasi serta meningkatkan sumber daya manusia dilingkungan Dinas Pendidikan sehingga sistem layanan tersebut teraji dengan sempurna sesuai harapan.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

5.2.1 Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Pemerataan pendidikan adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk memperoleh pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Program *Education for All* (Pendidikan Untuk Semua/PUS) menghendaki tidak ada seorang pun masyarakat Kabupaten Cirebon yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan dan sistem rekrutmen peserta didik harus mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat pada setiap jenjang dan jalur pendidikan serta tidak mempersulit dan memberatkan masyarakat.

Disamping itu perlu dibangun pelayanan pendidikan yang dapat dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat terkait dengan beberapa hal seperti biaya, waktu dan tempat penyelenggaraan, serta sistem informasi yang mudah diakses sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan.

Sosialisasi berbagai model pelayanan pendidikan harus menyentuh langsung pada sasaran tidak hanya dilakukan oleh pengelola pendidikan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan sehingga tercipta jalur – jalur strategis memperoleh pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan adalah salah satu faktor penentu

bagi semua jalur dan jenjang pendidikan dalam memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat menjangkau sampai kedaerah terpencil sekalipun.

5.2.2 Peningkatan Mutu Relevansi dan Daya Saing

Mutu, relevansi dan daya saing adalah hal yang tak dapat dipisahkan dalam kegiatan pelayanan pendidikan, tidak jarang harapan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui bangku pendidikan adalah jalan satu-satunya yang dipercaya dapat mewarnai keberhasilan dalam berbagai kesempatan memperoleh pekerjaan.

Namun demikian peningkatan mutu masih terus harus dipacu mengingat masih rendahnya mutu pendidikan yang ditandai dengan rendahnya nilai jual lulusan bahkan terhadap pekerjaan tertentu tanda bukti kelulusan / izazah tidak dijadikan barometer akibatnya sebagian orang berpendapat bahwa sekolah hanyalah perbuatan sia-sia, membuang waktu dan kesempatan karena dengan menempuh pendidikan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap dirinya.

Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan teknis seperti pelaksanaan MGMP dan sejenisnya serta pelatihan yang diberikan langsung terhadap peserta didik perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dengan melibatkan nara sumber yang berkompeten sehingga secara bertahap dapat meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing untuk dapat menapaki pintu gerbang globalisasi.

5.2.3 Penguatan Tata Kelola dan Pencitraan Publik

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh profesionalisme para pelaksana dalam mendorong terlaksananya manajerial yang tangguh dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi sehingga dapat mencapai hasil sesuai target.

Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan diantaranya harus memiliki visi dan misi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki tujuan yang dirumuskan dalam suatu bentuk perencanaan yang akan dicapai dalam sitiap tahapan sesuai target.

Disisi lain pengelolaan pendidikan harus dapat menyajikan data yang akurat, tepat, akuntabel dan mudah diakses apalagi dalam kondisi saat ini di mana pendidikan sedang menjadi primadona dan menjadi sorotan hampir seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu perlu secepatnya dibangun sistem pendataan pendidikan yang terpadu antara Dinas sampai ke sekolah-sekolah dengan memanfaatkan teknologi internet.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal diperlukan program pengasuhan dan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini. Isi, proses dan penilaian merupakan tiga standar nasional pendidikan yang terintegrasi menyeluruh dan terpadu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pelaksanaan tiga standar tersebut sangat menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Keterpaduan antar isi, proses dan penilaian tidak terlepas dari nilai-nilai moral, religi dan budaya keluarga serta masyarakat setempat sebagai tanggungjawab bersama.

Agar nilai-nilai tersebut dapat terwujud melalui pembiasaan kehidupan siswa, kegiatan prioritas yang akan dilakukan sebagai berikut.

- a) Pembangunan gedung sekolah;
- b) Pembangunan ruang kelas baru (RKB);
- c) Pembangunan, lapangan upacara dan pasilitas parkir;
- d) Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah;
- e) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa;
- f) Pengadaan meubelair sekolah;
- g) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;
- h) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- i) Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan model pembelajaran PAUD;
- j) Perencanaan penyusunan program PAUD;
- k) Publikasi dan sosialisasi PAUD.

5.2 WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN

Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Pemerintah. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI)

hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Untuk itu rencana program/kegiatan prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai berikut.

- a) Pelatihan menghafal Al-qur'an
- b) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD / MI & SMP/MTs;
- c) Pembinaan SMP Terbuka;
- d) Penyelenggaraan Paket B Setara SMP;
- e) Penyediaan Bea Siswa Transisi;
- f) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa;
- g) Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI dan SMP/MTs;
- h) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
- i) Pembangunan Ruang Penunjang Lain (RPL);
- j) Rehabilitasi ruang penunjang lain (RPL);
- k) Pembangunan perpustakaan sekolah;
- l) Rehabilitasi perpustakaan sekolah
- m) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah;
- n) Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah;
- o) Pembinaan bakat minat dan kreativitas siswa;
- p) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (UN);
- q) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan;
- r) Pelatihan Penyusunan Kurikulum;
- s) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;
- t) Pelatihan kompetensi pendidik paket B setara SMP;
- u) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- v) Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan GBDT;
- w) Penambahan ruang guru sekolah;
- x) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir;
- y) Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah;
- z) Pengadaan Meubelair Sekolah;
- aa) Pembangunan gedung sekolah;
- bb) Penerapan sistem informasi manajemen sarana dan prasarana sekolah;
- cc) Merger sekolah SD;

- dd) Penambahan Ruang Kelas Sekolah;
- ee) Optimalisasi jumlah siswa/rombel;
- ff) Rehab sedang/berat Ruang Kelas Sekolah;
- gg) Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar;
- hh) Penyelenggaraan akreditasi sekolah.

5.3 PENDIDIKAN MENENGAH

- a) Pelatihan menghafal Al-qur'an
- b) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MA;
- c) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SMA/SMK;
- d) Penyelenggaraan Paket C Setara SMA;
- e) Penyediaan buku pelajaran untuk SMA, SMK;
- f) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
- g) Pembangunan Ruang Penunjang Lain (RPL);
- h) Rehabilitasi ruang penunjang lain (RPL);
- i) Pembangunan perpustakaan sekolah;
- j) Rehabilitasi perpustakaan sekolah;
- k) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah;
- l) Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah;
- m) Pengembangan minat bakat dan prestasi;
- n) Monitoring Evaluasi dan pelaporan (BOS);
- o) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah;
- p) Pelatihan Penyusunan Kurikulum;
- q) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;
- r) Pelatihan kompetensi pendidik paket C setara SMA;
- s) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- t) Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan GBDT;
- u) Evaluasi ijin pendirian sekolah;
- v) Pembangunan gedung sekolah;

- w) Penyelenggaraan akreditasi sekolah;
- x) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir;
- y) Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah;
- z) Pengadaan Meubelair Sekolah;
- aa) Penambahan Ruang Kelas Sekolah;
- bb) Optimalisasi jumlah siswa/rombel;
- cc) Penambahan Ruang Kelas Sekolah;
- dd) Rehab sedang/berat Ruang Kelas Sekolah;
- ee) Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan menengah;
- h) Fasilitasi pelayanan pendidikan;
- i) Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM).

5.4 PENDIDIKAN NON FORMAL

- a) Pembinaan kursus dan kelembagaan;
- b) Pengembangan Pendidikan Keaksaraan;
- c) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal;
- d) Pengembangan Data dan Informasi Kelembagaan;
- e) Publikasi dan sosialisasi pendidikan Non formal;
- f) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal;
- g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan (UN);
- h) Peningkatan pengembangan pendidikan non formal;
- i) Pemberdayaan tenaga pendidik non formal;
- j) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup;
- k) Perencanaan penyusunan program pendidikan non formal;
- l) Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal.

5.5 PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a) Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG);
- b) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi;
- c) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi PTK;

- d) Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik (Pendidikan dasar dan menengah);
- e) Pembinaan angka kredit Pendidik;
- f) Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik;
- g) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- h) Pengembangan Sistem Pemetaan dan Pendataan PTK;
- i) Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

5.6 MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

- a) Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan (Pendidikan dasar dan menengah);
- b) Pelaksanaan Evaluasi hasil Kinerja Bidang Pendidikan;
- c) Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan;
- d) Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen pendidikan;
- e) Penyusunan capaian target SPM bidang Pendidikan;
- f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Target kinerja).

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 meliputi indikator kinerja pembangunan daerah yang menjelaskan pencapaian setiap misi RPJMD, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010. Target indikator kinerja daerah khusus bidang pendidikan ditetapkan mengacu pada target Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan arahan RPJPD Kabupaten Cirebon tahun 2005-2025 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya daerah.

Pelayanan Pendidikan selayaknya mendapat prioritas sejalan dengan Visi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam RPJMD Tahun 2014 - 2019 “Mewujudkan Masyarakat yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera” dimana yang dimaksud Sejahtera disini adalah Suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan bathin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tentram. Salah satu kebutuhan pokok/dasar yang dimaksud adalah kebutuhan akan pendidikan. Dengan kata lain masyarakat kesejahteraannya akan terganggu bila kebutuhan untuk memperoleh pendidikan (Formal/Non formal) tidak tercukupi.

Pelayanan pendidikan juga terkait dengan Misi Kedua RPJMD Kabupaten Cirebon 2014-2019 yaitu: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, **berbudaya, berilmu, dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan**, kesehatan, dan kewirausahaan serta terkait dengan **Program Unggulan Kepala Daerah** Dimana janji Bupati dan Wakil Bupati Cirebon selama kampanye pemilihan kepala daerah yang menjadi prioritas pertama program pembangunan daerah tahun 2014-2019 khusus bidang pendidikan yaitu:

1. Cirebon Bebas Buta Huruf al Qur'an / Cirebon Melek Huruf Qur'an;
2. Cirebon Bebas Biaya Pendidikan dan Bebas Putus Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah / Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Semua;
3. Cirebon Berbudaya Membaca;

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Th. 0	Th. 1	Th. 2	Th. 3	Th. 4	Th.5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pendidikan	79,44 - 80,04	80,33 - 81,6	81,89 - 82,93	83,22 - 84,27	84,56 - 85,60	85,89 - 86,67	85,89 - 86,67
	Indeks Pendidikan (IP Min)	79,44	80,33	81,89	83,22	84,56	85,89	85,89
	Indeks Pendidikan (IP Maks)	80,04	81,60	82,93	84,27	85,60	86,67	86,67
	Angka melek huruf	93,89	94,26	94,63	95	95,37	95,74	95,74
	AMH Min	94,5	95,5	96,5	97,5	98,5	99,5	99,5
	AMH Maks	95,4	96,4	97,4	98,4	99,4	100,0	100,0
	Angka rata-rata lama sekolah	7,01	7,4	7,5	7,9	8,2	8,5	8,5
	RLS Min	7,40	7,5	7,9	8,2	8,5	8,8	8,8
	RLS Maks	7,18	7,35	7,52	7,69	7,86	8,03	8,03
	Angka partisipasi murni (APM)		7,8	8,1	8,4	8,7	9	9,0
	SD/MI/Paket A	99,91	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96	99,96
	SMP/MTs/Paket B	89,5	89,7	89,9	90,1	90,3	90,50	90,50
	SMA/SMK/MA/Paket C	60,39	60,84	61,32	61,8	62,28	62,76	62,76
	Angka partisipasi kasar (APK)							
	SD/MI/Paket A	111	114	118	122	126	130	130
	SMP/MTs/Paket B	110,52	110,41	110,31	110,21	110,11	110,00	110,00
	SMA/SMK/MA/Paket C	79,06	79,54	80,02	80,5	80,98	81	81

BAB VII

PENUTUP

7.1 KESIMPULAN

Renstra Dinas Pendidikan merupakan arah untuk mewujudkan suatu komitmen dari seluruh pengelola dan pemerhati pendidikan dalam merealisasikan cita-cita masyarakat Kabupaten Cirebon seperti yang tercantum dalam VISI dan MISI yang diimplementasikan dalam rencana program dan kegiatan tahun 2014-2019.

Jika Renstra dapat dilaksanakan sesuai tahapannya, maka akan terjadi peningkatan IPM masyarakat Kabupaten Cirebon, hal ini menggambarkan tingkat kemampuan dan kualitas hidup masyarakat, sehingga diharapkan dapat bersaing dalam era global yang penuh kompetisi dan tantangan.

7.2 SARAN

Untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut dan dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif maka perlu :

1. Adanya kesadaran dan kemauan dari seluruh jajaran pendidikan mulai dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memahami dengan baik konsep-konsep yang tersurat maupun tersirat di dalam visi dan misi yang telah disepakati bersama
2. Adanya komitmen seluruh jajaran untuk membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung terhadap pencapaian IPM 76,74 di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019.
3. Adanya konsistensi untuk senantiasa beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang menjadi tuntutan masyarakat, dalam arti mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara optimal dengan meminimalisasi dampak negatif
4. Optimalisasi tugas, fungsi dan peran kelembagaan dan memobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan setiap rencana yang telah ditetapkan

Demikian rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan dalam rangka pencapaian IPM sesuai target pada tahun 2019.

BUPATI CIREBON

SUNJAYA PURWADISAstra

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

DUDUNG MULYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR ,
SERI**